

**Penggambaran Tindak Kecurangan Pada Sektor Publik Melalui  
Pemberitaan Media Elektronik Kompas.com  
Di Indonesia Tahun 2017**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**Penggambaran Tindak Kecurangan Pada Sektor Publik Melalui**

**Pemberitaan Media Elektronik Kompas.com**

**Di Indonesia Tahun 2017**



Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Shania Rizky Amalia

Nomor Mahasiswa: 14312356

الجامعة الإسلامية  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 16 April 2018

Penulis,



(Shania Rizky Amalia)

**Penggambaran Tindak Kecurangan Pada Sektor Publik Melalui  
Pemberitaan Media Elektronik Kompas.com  
Di Indonesia Tahun 2017**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Shania Rizky Amalia

No.Mahasiswa: 14312356

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 16-4-2018

Dosen Pembimbing,



(Fitriati Akmila, SE., M.Com.)

## MOTTO

“Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.”

*Ibnu Qayyim Al Jauziyyah*

“Hisablah dirimu sendiri sebelum kau dihisab. Timbanglah dirimu sendiri sebelum kau ditimbang. Dan bersiaplah untuk hari besar ditampakkannya amal.”

*Umar bin Khattab*

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

*QS Ar Ra'd 11*

الجامعة الإسلامية  
الاستاذة الأندلسية

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGAMBARAN TINDAK KECURANGAN PADA SEKTOR PUBLIK MELALUI  
PEMBERITAAN MEDIA ELEKTRONIK KOMPAS.COM  
DI INDONESIA TAHUN 2017**

Disusun Oleh : **SHANIA RIZKI AMALIA**  
Nomor Mahasiswa : **14312356**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 15 Mei 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Fitriati Akmila, SE, M.Com.



Penguji : Ayu Chairina Laksmi, SE, M.App. Com. M.Res, Ph.D., Ak., CA.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia

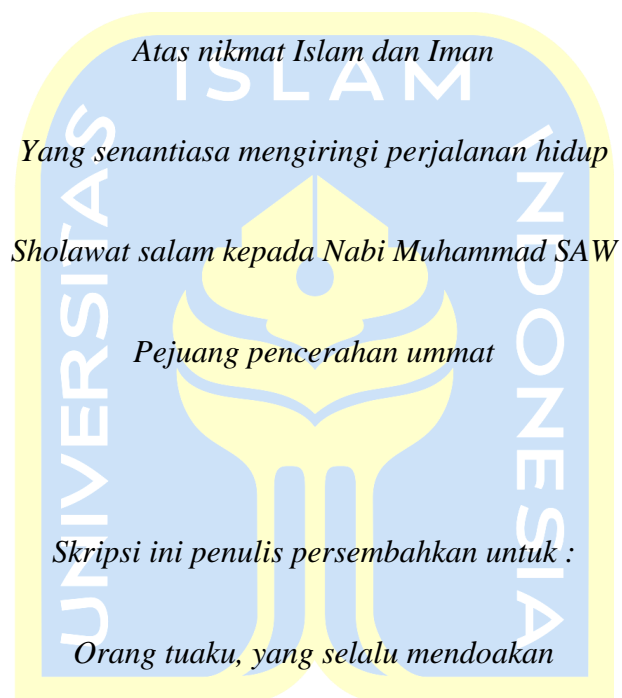


Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin*

*Rasa syukur kepada Allah SWT*



*Teman-temanku, yang selalu menguatkan*  
*dan almamater yang ku banggakan*

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah diutus ke bumi sebagai lentera bagi hati manusia, Nabi yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan yang luar biasa seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul **“PENGGAMBARAN TINDAK KECURANGAN PADA SEKTOR PUBLIK MELALUI PEMBERITAAN MEDIA ELEKTRONIK KOMPAS.COM DI INDONESIA TAHUN 2017”** disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mengalami beberapa hambatan dan kesulitan yang terkadang membuat penulis berada di titik terlemah dirinya. Namun adanya doa restu, dan dorongan dari orang tua, teman-teman yang tak pernah putus menjadikan penulis bersemangat untuk melanjutkan penulisan skripsi ini. Untuk itu dengan segala bakti, penulis memberikan



penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka semua. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SubhanahuWaTa'ala, yang selalu memberikan petunjuk, pencerahan, kemudahan, kekuatan serta ridho, dan kasih sayang yang tiada terkira kepada setiap hamba-Nya, dan tidak terkecuali kepada penulis juga kepada Nabi Muhammad SAW yang telah diutus ke bumi sebagai lentera bagi hati manusia.
2. Kedua orang tua saya Papa Shanuri dan Mama Ning yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, kesabaran dan pengorbanan yang begitu luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis. Semoga mama papa sehat selalu dan dimudahkan urusan dunia akhiratnya ya aamiin.
3. Kakak-kakakku, Mba Nita dan sekeluarga (Pipi, Dede Al dan Kaka Yaya), dan Mba Putri beserta Suaminya Mas Arif yang sudah memberikan dukungan dan semangat. Semoga kalian dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Aamiin.
4. Ibu Fitriati Akmila, SE., M.Com. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. Drs. Dwipraptono Agus Hardjito, Drs., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

6. Bapak Dekar Urumsah, S.E., S.Si.,M.Com., Ph.D selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
7. Keluarga Kos Kembali ke Safitri, Cintia Zelin, Ade Nur Selviani, Septianti Anita Devi, Rosy Amalia Rosyada, Rahmawati Nur Waridah, Nia Safitri dan Mia Hernawati. Makasi yaa kalian sangat sangat menemani hari-hariku yang kadang naik-turun. Selalu menghibur, memberi semangat, dan nasihat juga. Semoga silahturahmi kita selalu dan tetap terjaga sampai kita semua sukses yaaa sampai masing-masing punya keluarga kecil sendiri.
8. Teman-teman saya semasa SMA sampai sekarang (Dini, Melati, Eva a.k.a Cabe, dan Nisa) yang suka bikin ketawa tiap kali sedang stress atau lelah sama kuliah dan bantuin nyari jurnal awal-awal mulai skripsi.
9. Sahabat-sahabat kuliah, Putri, Gandhes, Hani(Hanndut), lia, Rafani, mba Lala, mba Bella yang sudah memberi semangat dan dukungan. Dan buat Sitha juga makasi ya sudah selalu menemani dan membantu di saat-saat lagi down banget, temen diet tapi temen makan juga jadi susah kurus barengnya. Sukses ya buat kalian.
10. Sahabat-sahabat SMA jarak jauh yang selalu sibuk dan susah ngumpul full team tapi ngangenin Depe, Depi, Intan, Fini, Ayu, Esti, dan pastinya Venna sayang yang selalu dengerin curhatan kapanpun dimanapun berjam-jam cerita ga berenti tentang masalah hati. Walaupun jauh tapi tetap komunikasi pokoknya sayang kalian see you on top yha!
11. Last but not least , keep the last for the best. Muhammad Adnan Risnanda sudah lebih dari teman hampir 4 tahun ini menemani. Makasih ya sudah mau

sabar membantu dan nemenin kemana-mana. Makasih sudah mau nganterin kemana-mana juga. Been through ups and downs bareng pokoknya see you in another chapter ya.

Dalam menyusun skripsi, penulis menyadari banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun cara menyajikan. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan kemampuan dan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menciptakan karya yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Semoga skripsi dapat membawa manfaat bagi para pembaca dan semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoi-Nya. Amin.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Yogyakarta, 16 April 2018

Penulis,



الجمعة الاستغاثة الأندلسية

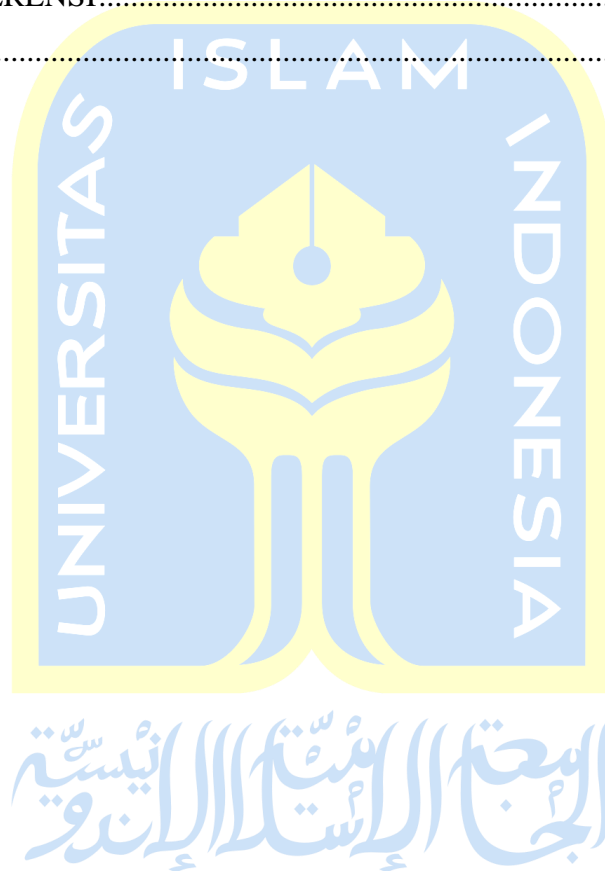
Shania Rizky Amalia

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.. <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.v</b>
MOTTO .....	v
HALAMAN BERITA ACARA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
ABSTRACT .....	xviii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Batasan Masalah .....	6
1.3 Rumusan Masalah .....	7
1.4 Tujuan Penelitian .....	7
1.5 Manfaat Penelitian .....	7
1.6 Sistematika Pembahasan .....	8
BAB II .....	10
KAJIAN PUSTAKA .....	10
2.1 Definisi <i>Fraud</i> .....	10
2.2 Teori-teori Tentang <i>Fraud</i> .....	13
2.3 <i>Fraud Triangle</i> .....	17

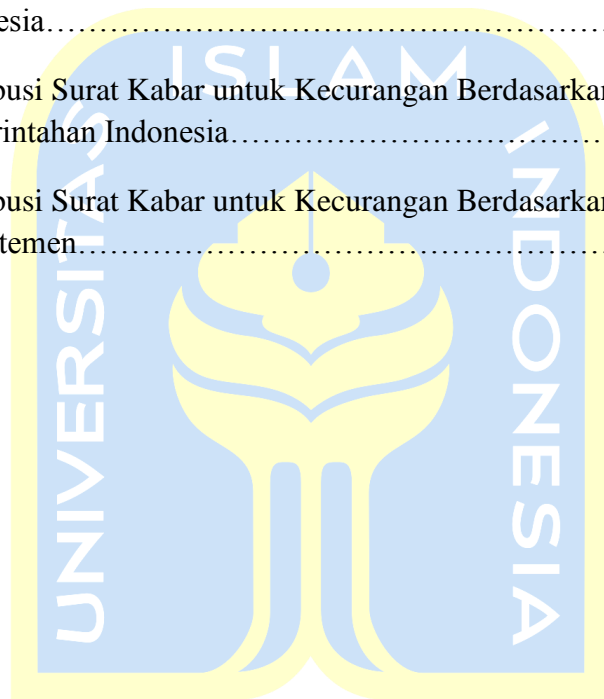
2.4 <i>Fraud Diamond</i> .....	17
2.5 Jenis-jenis <i>Fraud</i> .....	18
2.6 Sistem Pemerintahan Indonesia .....	20
2.7 Kecurangan ( <i>Fraud</i> ) di Sektor Pemerintahan .....	22
2.8 Penelitian Terdahulu .....	23
BAB III .....	26
METODE PENELITIAN .....	26
3.1 Pendekatan Penelitian .....	26
3.2 Unit Analisis .....	28
3.3 Instrumen Penelitian .....	29
3.4 Sumber Data .....	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.6 Teknik Analisis Data .....	31
3.7 Pengujian Keabsahan Data .....	32
3.8 Tahap-tahap Penelitian .....	34
BAB IV .....	38
ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	38
4.1 Profil Kompas.com .....	38
4.2 Hasil Pengumpulan Data .....	42
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian .....	43
4.3.1 Distribusi Surat Kabar untuk Kecurangan pada Sektor Pemerintahan Berdasarkan Bulan .....	43
4.3.2 Distribusi Kasus Kecurangan Berdasarkan Jenis-Jenis Kecurangan ...	46
4.3.3 Distribusi Surat Kabar untuk Kecurangan Berdasarkan Daerah di Indonesia .....	48
4.3.4 Distribusi Surat Kabar untuk Kecurangan Berdasarkan Tingkat Pemerintahan .....	50
4.3.5 Distribusi Surat Kabar untuk Kecurangan Berdasarkan Departemen-Departemen .....	52
4.3.6 Pola Pemberitaan Berita Korupsi Tahun 2017 .....	56
4.4 Kasus Korupsi E-KTP .....	56

4.5 Kesimpulan .....	58
BAB V .....	60
PENUTUP .....	60
5.1 Kesimpulan .....	60
5.2 Implikasi Penelitian.....	62
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	63
5.4 Saran.....	63
DAFTAR REFERENSI.....	65
LAMPIRAN .....	68



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Distribusi Surat Kabar untuk Kecurangan pada Sektor Pemerintahan Berdasarkan Bulan.....	42
Tabel 4.2 Distribusi Kasus Kecurangan Berdasarkan Jenis-Jenis Kecurangan.....	45
Tabel 4.3 Distribusi Surat Kabar untuk Kecurangan Berdasarkan Daerah di Indonesia.....	47
Tabel 4.4 Distribusi Surat Kabar untuk Kecurangan Berdasarkan Tingkat Pemerintahan Indonesia.....	49
Tabel 4.5 Distribusi Surat Kabar untuk Kecurangan Berdasarkan Departemen-Departemen.....	51



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 <i>Fraud Triangle</i> Menurut Donald R. Cressey.....	18
Gambar 2 <i>Fraud Diamond</i> Menurut Wolfe dan Hermanson.....	19
Gambar 3 Tahap-Tahap Penelitian.....	39
Gambar 4 Grafik Berita Selama Tahun 2017 di Kompas.....	56





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Januari.....	66
Lampiran 2 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Februari.....	68
Lampiran 3 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Maret.....	70
Lampiran 4 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan April.....	72
Lampiran 5 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Mei.....	74
Lampiran 6 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Juni.....	76
Lampiran 7 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Juli.....	78
Lampiran 8 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Agustus.....	80
Lampiran 9 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan September.....	82
Lampiran 10 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Oktober.....	84
Lampiran 11 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan November.....	87
Lampiran 12 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Desember.....	89

الجمعة الإسلامية  
الاستاذة الأندلسية

## ABSTRACT

*Fraud in the government such as corruption, misuse of power, and misappropriation of assets has tarnished the image of Indonesian government for many years. The fraud is a violation of social rights and economic rights of the people. So corruption is classified as an extraordinary crime. Notes on corruption and other fraud that are daily reported by print and electronic media, are seen as an increase and development of corruption models. This study aims to see the pattern and frequency of reporting of fraud in Indonesian government through the best media. This research is a descriptive qualitative research by using content analysis method for fraud acts reported by newspaper media online through websites that used as data source. The results of this study indicate that the news about corruption is the most widely reported and attracts the attention of the public who observes the progress of each case. The case of e-KTP corruption is the largest and most reported case during 2017, involving many major figures in the Ministry of Home Affairs.*

**Keyword:** *Fraud, Corruption, Government, Media*

الجمهورية الإسلامية الإندونيسية

## ABSTRAK

Tindak kecurangan dalam pemerintahan yang sudah tidak asing lagi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyelewengan asset sudah banyak menodai citra pemerintahan Indonesia sejak bertahun-tahun lalu. Tindak kecurangan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Sehingga korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa. Berbagai catatan tentang korupsi dan tindak kecurangan lainnya yang setiap hari diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik, terlihat adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat penggambaran pola dan frekuensi pemberitaan mengenai tindak kecurangan pada pemerintahan Indonesia melalui media surat kabar terbaik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode konten analisis atas tindak kecurangan yang diberitakan oleh media surat kabar secara online pada situs berita yang digunakan sebagai sumber data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berita tentang korupsi paling banyak diberitakan dan menarik perhatian masyarakat yang mengamati perkembangan dari tiap-tiap kasus yang ada. Kasus korupsi e-KTP merupakan kasus terbesar dan terbanyak diberitakan sepanjang tahun 2017, melibatkan banyak tokoh besar dalam kementerian dalam negeri.

**Kata Kunci:** Tindak Kecurangan, Korupsi, Pemerintahan, Media

الجمهورية الإسلامية الإندونيسية

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. 1 Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia sudah sangat merajalela dan menjadi fenomena sosial yang terjadi pada tatanan pemerintahan. Fenomena korupsi dalam administrasi publik sering kali menjadi persoalan utama pada pemerintahan, karena korupsi telah masuk pada praktik administrasi publik dalam tata pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan dari pelaksanaan fungsi pemerintahan menjadi bagian dalam melakukan tindak pidana korupsi. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, akan tetapi sudah menjadi sebuah kejahatan.

Dalam perkembangannya korupsi sering kali menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan maupun pelaksanaan pemerintahan suatu negara. Kegiatan korupsi dijadikan sebagai jalan pemulus tujuan seseorang maupun institusi dalam mencapai tujuan yang diinginkan terutama dikalangan pejabat publik (pemerintahan).

Pola kegiatan yang dilakukan dalam melakukan korupsi sangat beraneka ragam dan memakai modus tertentu untuk dapat mencuri uang negara. Kegiatan korupsi yang dilakukan dalam pemerintahan meliputi penggelembungan harga, penyimpangan anggaran, penggelapan, manipulasi, *mark up*, penyuapan, proyek/kegiatan fiktif, pungutan liar, kredit macet, dan penyalahgunaan wewenang (Napitupulu, 2010).

Ditemukannya berbagai macam kasus korupsi yang menyeret pejabat publik dalam instansi pemerintahan menjadikan citra Indonesia menurun dalam dunia internasional. Terbukti dengan terungkapnya kasus korupsi yang terjadi di dalam pemerintahan, negara mengalami kerugian yang tidak sedikit. Menurut Wakil Ketua KPK M. Busyro (2012) sepanjang 2004-2011, setidaknya 332 pejabat publik terjerat kasus korupsi dan kerugian yang diderita negara mencapai Rp 39,3 triliun. Keterlibatan pejabat publik dalam melakukan tindakan korupsi membuat pelayanan negara dalam melayani masyarakatnya tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan data yang dirilis CNN (2016) Indonesia, Mahkamah Agung memaparkan jumlah penanganan kasus korupsi tahun 2016 yaitu mencapai 453 perkara, menempati urutan kedua setelah kasus narkotik. Sementara kasus narkotik mencapai 800 perkara. Lebih dari 497,6 miliar rupiah telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBP dari penanganan perkaratindak pidana korupsi. Sementara data penanganan perkara berdasarkan tingkat jabatan, mengungkapkan ada 26 perkara yang melibatkan swasta dan 23 perkara melibatkan anggota DPR/DPRD. Selain itu, terdapat 10 perkara, melibatkan pejabat eselon I, II dan III; serta 8 perkara yang melibatkan bupati/walikota dan wakilnya.

Korupsi di Indonesia telah membawa disharmonisasi politik-ekonomi-sosial. Bahkan bisa jadi sebuah budaya baru di negeri tercinta ini, grafik pertumbuhan jumlah rakyat miskin terus naik karena korupsi. Dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, praktek korupsi makin mudah ditemukan diberbagai bidang

kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi pilihan lebih utama dibandingkan kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagian besar orang. Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas public. Biro pelayanan publik justru digunakan oleh pejabat publik untuk mengejar ambisi politik pribadi, semata-mata demi promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Sementara kualitas dan kuantitas pelayanan publik semakin terabaikan, bukan prioritas dan orientasi yang utama. Dan dua alasan ini menyeruak di Indonesia, pelayanan publik tidak pernah maksimal karena praktik korupsi dan demokratis justru memfasilitasi korupsi (Ermansjah, 2010).

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), kecurangan (*fraud*) adalah tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain (Senna, 2015). Adapun menurut standar *Institute of Internal Auditors* (IIA) dalam sawyer (2006) *fraud* adalah suatu tindakan penipuan yang mencakup berbagai penyimpangan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan disengaja.

Wertheim dalam Revida (2003) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila pejabat menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar pejabat tersebut mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan pemberi hadiah. Kadang-kadang

orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi.

Menurut Wilopo (2008), risiko yang melekat untuk terjadinya korupsi ditentukan oleh tingkat kejelasan dari suatu program. Di samping itu resiko tersebut ditentukan oleh seberapa besar anggaran untuk melaksanakan kegiatan. Semakin besar anggarannya, semakin besar kemungkinan terjadinya korupsi.

Semakin besar pengaruh pendapatan keuangan di luar pemerintah, semakin besar kemungkinan terjadinya korupsi. Korupsi dapat membuat pelayanan khususnya dalam sektor pemerintahan menjadi tidak maksimal dikarenakan adanya penyaluran anggaran yang kurang sempurna sehingga masyarakat dirugikan karena tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparatur yang berkaitan.

Gbegi dan Adebisi (2013) kemudian menyarankan bahwa teori *fraud triangle* untuk memasukkan integritas pribadi sebagai sebuah faktor tambahan. Faktor penyebab terjadinya *fraud*, diantaranya yaitu menurut teori *Fraud Triangle* Cressey (1953) dalam Tuanakotta (2007), kecurangan (*fraud*) disebabkan oleh 3 faktor yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*) dan rasionalitas (*rationalization*), atau disebut dengan segitiga kecurangan (*fraud triangle*). Unsur tekanan (*pressure*) bisa dalam bentuk kebutuhan keuangan, gaya hidup, serta tekanan pihak lain yang menyebabkan seseorang terdorong melakukan kecurangan (*fraud*). Unsur peluang (*opportunity*) antara lain lemahnya pengendalian internal, sistem yang mendukung, serta kepercayaan terhadap tugas seseorang terlalu luas dan berlebihan. Unsur rasionalitas

(*rationalization*) menerangkan kecurangan(*fraud*) terjadi karena kondisi nilai-nilai etika lokal yang mendorong terjadinya kecurangan (*fraud*).

Penyebab kecurangan (*fraud*) dikembangkan oleh Bologna (1993), teori ini menjelaskan tentang penyebab kecurangan (*fraud*) atau juga dikenal sebagai *GONE Theory*, terdiri dari empat faktor yang mendorong seseorang berperilaku menyimpang (*fraud*). Keempat faktor tersebut adalah *greed* atau keserakah, berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang, *opportunity* atau kesempatan, berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya, *needs* atau kebutuhan, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang menurutnya wajar, dan *exposure* atau pengungkapan, berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.

Kasus - kasus kecurangan atau korupsi sering diberitakan di Indonesia. Tidak sedikit pula nominal yang dilahap para koruptor yang sangat merugikan negara. Kasus korupsi sangat menodai citra institusi sektor pemerintahan yang harusnya menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas kepada masyarakat luas. Platform utama yang umum untuk menyoroiti kasus korupsi di kalangan pegawai di sektor pemerintahan ini adalah media. Sudah menjadi hak publik untuk diberi tahu mengenai bagaimana pihak berwenang mengelola aset publik dan apakah pegawainya telah menyalahgunakan tanggung jawab mereka. Paparan semacam itu dapat memaksa badan-badan yang terlibat untuk memantau aktivitas pegawai



mereka secara ketat dan menggunakan tindakan pencegahan yang efektif untuk mencegah kejadian tersebut berulang.

Pada penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Aishah (2017) tentang pemberitaan kasus-kasus korupsi di Malaysia melalui empat surat kabar umum disana dalam dua Bahasa yaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggris. Dalam penelitiannya, Aishah (2017) menyimpulkan bahwa surat kabar Bahasa Inggris melaporkan kasus korupsi lebih tinggi yang melibatkan pegawai sektor publik dari pada surat kabar Malaysia itu sendiri selama tahun 2016 dan berhasil mengumpulkan sebanyak 603 berita dari empat surat kabar. Media tertinggi yang melaporkan kecurangan adalah kasus penipuan yang melibatkan Departemen Air Sabah (SWD), sementara kasus kecurangan tertinggi dilaporkan di antara pemerintah negara bagian, diikuti oleh pemerintah federal dan pemerintah daerah. Sedangkan pada penelitian ini melakukan penelitian tentang pemberitaan kasus-kasus korupsi di Indonesia dan menggunakan satu surat kabar terbesar di Indonesia selama tahun 2017.

Berdasarkan penjelasan dan uraian tentang kecurangan pada sektor publik di Indonesia yaitu tindak korupsi yang sangat marak terjadi beberapa tahun ini. Oleh karena itu, peneliti merasa termotivasi dan tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pemberitaan tindak kecurangan korupsi ini dengan mengambil judul penelitian **“Penggambaran Tindak Kecurangan Pada Sektor Publik Melalui Pemberitaan Media di Indonesia Tahun 2017”**.

## **1.2 Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki batasan masalah yaitu:

Penelitian ini membahas penggambaran tindak kecurangan di sektor publik Indonesia melalui media pemberitaan selama satu tahun. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pengertian dan penafsiran, maka diperlukan batasan dalam penelitian ini. Fokus dari penelitian ini yaitu hanya membahas pada pemberitaan kecurangan atau kasus-kasus korupsi yang sedang terjadi di Indonesia pada tahun 2017.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa tinggi frekuensi pemberitaan media mengenai berita korupsi pada sektor pemerintahan?
2. Bagaimana pola pemberitaan media mengenai berita korupsi pada sektor pemerintahan?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui seberapa tinggi frekuensi pemberitaan berita korupsi pada sektor pemerintahan.
2. Mengetahui pola pemberitaan berita korupsi pada sektor pemerintahan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu :

1. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang frekuensi, serta pola pemberitaan berita korupsi yang marak di beritakan di media di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi tambahan informasi dan mampu menjadi bahan referensi bagi penelitian lain dalam bidang yang terkait serta memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian.

## 2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh dalam perkuliahan dalam memecahkan masalah. Sehingga memperoleh gambaran yang jelas sejauh mana tercapai keselarasan antara pengetahuan secara teoritis dan praktiknya.

### **1.6 Sistematika Pembahasan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang terjadinya masalah, batasan masalah/fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang penjabaran dan pengertian mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini serta penjabaran mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang alasan penulis menggunakan metode kualitatif, alasan dalam memilih tempat penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengujian keabsahan data yang digunakan penulis dalam penelitiannya.

#### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasannya. Bagian ini memuat semua temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian. Hasil analisis digunakan penulis untuk menjawab rumusan permasalahan berdasarkan pada telaah teoritik dan metodologi yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian, dan saran dari penulis.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi penjelasan dan pembahasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian dan penelitian-penelitian terdahulu yang diharapkan dapat membantu penulis untuk menjalankan penelitian ini. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Definisi *Fraud*, Jenis-Jenis *Fraud*, Teori-Teori Tentang *Fraud*, *Fraud Triangle* dan *Fraud Diamond*, Sistem Pemerintahan di Indonesia dan *Fraud* di Sektor Pemerintahan.

#### **2.1 Definisi *Fraud***

Menurut Romney dan Steinbart (2012), penipuan (*fraud*) adalah beberapa dan semua sarana yang digunakan oleh pelaku penipuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak jujur dari orang lain. Seseorang dikatakan melakukan penipuan (*fraud*) jika:

1. Pernyataan, representasi, atau pengungkapan yang salah.
2. Fakta material adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak.
3. Terdapat niat untuk melakukan penipuan.
4. Kepercayaan yang dijustifikasi (dibenarkan).
5. Kerugian yang diderita oleh korban.

Menurut Black's Law Dictionary, kecurangan (*fraud*) didefinisikan sebagai suatu istilah generik:

*“Embracing all multifarious means which human ingenuity can devise, and which are resorted to by one individual to get an advantage over another by false suggestions or suppression of truth, and includes all surprise, trick, cunning, or dissembling, and any unfair way by which another is cheated.”*

Black’s Law Dictionary menguraikan pengertian *fraud* mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang, untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat. Licik, tersembunyi, dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu.

Menurut IAI (2001) dalam Wilopo (2008) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penggelapan atau penyalahgunaan).

Adapun definisi *fraud* menurut BPK RI (2007) adalah sebagai satu jenis tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu.

Menurut Tampubolon (2005) dalam Kurniawati (2012) berpendapat, *fraud* tidak selalu sama dengan tindak kriminal. Tindakan *fraud* dapat dikatakan sebagai kriminal apabila niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak jujur tersebut juga sekaligus melanggar ketentuan hukum, misalnya

korupsi atau penggelapan pajak. *Fraud* yang bukan kriminal masuk kategori risiko operasional, sedangkan *fraud* yang sekaligus tindak kriminal masuk kategori risiko ilegal.

Penipuan juga didefinisikan sebagai kejahatan dan gugatan karena representasi palsu dan material (Singleton et al., 2006) dalam Aishah (2016). Istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan kecurangan secara bergantian adalah pencurian, penyimpangan, kejahatan kerah putih, dan penggelapan uang. Istilah-istilah ini, bagaimanapun, ditemukan tidak identik menurut hukum pidana. Misalnya, pencurian berarti mengambil dan membawa barang milik orang lain dengan tujuan untuk secara permanen mencabut pemilik kepemilikannya. Menurut Sarah dkk. (1998) dalam Aishah (2016) mengembangkan taksiran kecurangan untuk mengklasifikasikan kecurangan menurut jenisnya. Taksonomi memiliki 12 kategori umum yang terdiri dari "pendapatan fiktif, pengakuan pendapatan prematur, kesalahan klasifikasi, aset fiktif atau pengurangan biaya/kewajiban, aset terlalu tinggi dan biaya/kewajiban yang dinilai terlalu rendah, kewajiban yang dilewatkan atau *undervalued* (mempengaruhi biaya atau aset), diabaikan atau Pengungkapan yang tidak tepat, kecurangan ekuitas, transaksi pihak terkait, kecurangan menjadi "cara yang salah" (yang mengecilkan pendapatan/asset), tindakan ilegal dan lain-lain (termasuk masalah konsolidasi). Setiap kategori berisi beberapa skema penipuan individu.

Di sisi lain, Keller dan Owens (2015) dalam Aishah (2016) mengategorikan kecurangan menjadi dua kategori yaitu kecurangan internal

dan eksternal. Sementara kecurangan internal dilakukan oleh orang-orang di dalam entitas, seperti petugas, karyawan, dan direktur, penipuan eksternal dilakukan oleh orang-orang di luar entitas, seperti vendor. Kecurangan internal, di sisi lain, dapat dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu penyalahgunaan aset dan pelaporan keuangan yang tidak benar atau kecurangan laporan keuangan. Contoh penyalahgunaan aset adalah skema pendapatan dan penerimaan kas, skema pengadaan dan pencairan uang tunai, skema pelaporan gaji dan biaya karyawan, dan penyalahgunaan aset non-kas, sedangkan kecurangan laporan keuangan melibatkan entri jurnal yang tidak benar atau penggantian manajerial yang telah memanfaatkan entri jurnal dalam sistem informasi akuntansi (Debreceeny dan Gray, 2010)

## **2.2 Teori-teori Tentang Fraud**

Dalam *International Profesional Practices Framework* (IPPF) (2016), bagian *Standard Glossary*, *The Institute of Internal Auditors* (IIA) mendefinisikan dan menjelaskan *fraud* sebagai:

*“Any illegal act characterized by deceit, concealment, or violation of trust. These acts are not dependent upon the threat of violence or physical force. Frauds are perpetrated by parties and organizations to obtain money, property, or services; to avoid payment or loss of services; or to secure personal or business advantage.”*

*The Institute of Internal Auditors* (IIA) menjelaskan bahwa *fraud* merupakan tindakan ilegal apa pun yang ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau



pelanggaran kepercayaan. Tindakan-tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan dilakukan oleh pihak dan organisasi untuk mendapatkan uang, properti, atau layanan; untuk menghindari pembayaran atau kehilangan layanan; atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis.

Dari sisi pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat awam sekalipun, *fraud* telah dipahami dapat merugikan keuangan negara, keuangan perusahaan, dan merusak sendi-sendi budaya masyarakat. Namun umumnya, pimpinan suatu organisasi/instansi seringkali merasa bahwa organisasinya termasuk lingkungan yang terbebas dari risiko *fraud* (Sudarmo dkk, 2008). Dan jika *fraud* terjadi di sektor pemerintahan, maka hal ini merupakan sesuatu yang serius sebab sumber daya yang terbatas tidak digunakan untuk pelayanan bagi masyarakat atau konstituen dan yang lebih parahnya lagi, masyarakat atau konstituen akan kehilangan kepercayaan pada kemampuan kepemimpinan instansi pemerintahan dalam memerintah.

Sudarmo dkk (2008) menyatakan bahwa pada kenyataannya *fraud* hampir terdapat di setiap lini pada suatu organisasi, mulai dari jajaran manajemen/pimpinan puncak sampai jajaran terdepan / pelaksana bahkan sampai pesuruh (*office boy*). *Fraud* dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh seorang pegawai yang tampaknya jujur sekalipun.

Lebih lanjut, Sudarmo dkk (2008) menyatakan bahwa meskipun masyarakat, praktisi anti-korupsi, dan para peneliti menyakini bahwa *fraud* di Indonesia, secara jumlah dan frekuensi, dari tahun ke tahun, terus meningkat secara tajam,

secara faktual sulit untuk mengkuantifikasi kerugian nyata perbuatan *fraud*. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan *fraud* sulit ditemukan dan diungkap secara tuntas. Hal ini disebabkan sulit untuk mengidentifikasi dan membedakan antara ketidakhati-hatian dan kelemahan metode pencatatan dengan unsur perbuatan *fraud* itu sendiri. Di samping itu, dalam beberapa kasus, pimpinan organisasi cenderung untuk menangani kasus *fraud* secara diam-diam atau bahkan menutup-nutupinya dari publik, dengan dalih pembinaan terhadap organisasi.

Menurut Sawyer dkk (2006) *fraud* oleh karyawan dan manajemen merupakan rumput liar beracun yang tumbuh subur dalam sebuah iklim yang permisif dimana benih-benih *fraud* dibantu bahkan diundang untuk tumbuh dan berkembang. Untuk mencegah terjadinya *fraud*, lingkungan dalam sebuah organisasi harus tegas. Manajemen hendaknya menentukan dengan jelas dalam kebijakan-kebijakan tertulisnya mengenai komitmen dalam perlakuan yang adil, posisinya dalam konflik kepentingan, persyaratannya akan merekrut karyawan-karyawan yang jujur, keharusannya akan kontrol internal yang kuat dan diatur dengan baik, serta keteguhannya untuk menghukum yang bersalah. Di samping iklim yang permisif, terdapat tiga gabungan kondisi lain yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan *fraud*, yaitu:

1. Tekanan situasional pada karyawan. Karyawan mungkin terlibat utang atau ia mungkin ditekan untuk memperbaiki posisinya. Begitu pula kompetisi yang kuat, skedul atau spesifikasi yang berat, atau peraturan-peraturan yang keras, mungkin karyawan akan melakukan hal-hal yang ilegal atau tidak etis untuk membalikkan posisi mereka atau institusi mereka.

2. Akses terhadap aktiva yang tidak terkontrol, bersama-sama dengan ketidakpedulian dari manajemen. Salah satu penangkal yang paling kuat bagi *fraud* oleh karyawan dan manajemen adalah kepastian pendeteksian dan hukuman. Kontrol yang kuat dan pengawasan yang ketat makin meningkatkan kepastian ini.
3. Kepribadian yang menggerogoti integritas seseorang. Beberapa orang memiliki kecenderungan untuk mengambil jalan yang tidak jujur. Ketika orang lain melihat tidak adanya halangan dalam jalan tersebut maka mereka akan cenderung untuk ikut melakukannya.

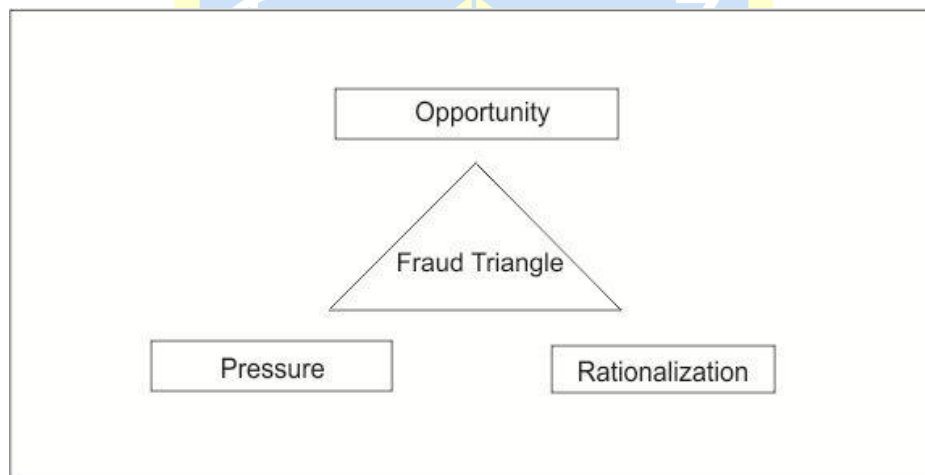
Berkaitan dengan pendekatan keorganisasian untuk mengendalikan *fraud* di lingkungan organisasi pemerintah, BPKP (2010) mengungkapkan bahwa walaupun upaya represif terhadap *fraud* telah dilakukan secara intensif, namun kerentanan organisasi pemerintah terhadap *fraud* dari hari ke hari cenderung meningkat. Pimpinan organisasi dapat mempelajari bagaimana penyimpangan terjadi, siapa yang melakukan, bagaimana mereka dapat melakukannya, bagaimana kecurangan terdeteksi, dan sebagainya, sehingga dapat mengambil langkah untuk memaksimalkan kemampuan organisasi untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya *fraud*.

Menurut BPKP (2010), kunci untuk mencegah dan mudah mendeteksi *fraud* adalah penerapan model penangkal multisegi (*organization-wide model of deterrence*). Model ini mengandalkan keterlibatan penangkal korupsi pada setiap level dan fungsi pada organisasi. Model ini meliputi tiga komponen yang saling berinteraksi yang dirancang untuk memaksimalkan kesempatan organisasi

dalam mencegah dan mendeteksi fraud, yaitu (1) pengendalian keuangan; (2) sistem non keuangan; dan (3) pengawasan dan perilaku manajemen.

### 2.3 *Fraud Triangle*

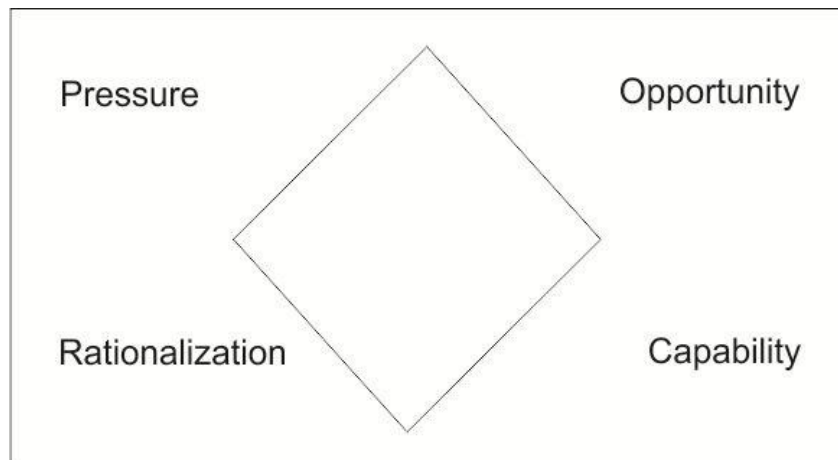
*Fraud triangle* adalah faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan penipuan dan terdapat tiga factor yang menyebabkan seseorang melakukannya yaitu tekanan, kesempatan dan rasionalisasi (Romney dan Steinbart, 2012). Gbegi dan Adebisi (2013) menyarankan bahwa teori *fraud triangle* untuk memasukkan integritas pribadi sebagai sebuah faktor tambahan.



Gambar 1. *Fraud Triangle* menurut Donald R. Cressey (1950)

### 2.4 *Fraud Diamond*

*Fraud diamond* merupakan sebuah pandangan baru tentang fenomena *Fraud* yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004). *Fraud diamond* merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori *Fraud triangle* oleh Cressey (1950). *Fraud diamond* menambahkan satu elemen kualitatif yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap *Fraud* yakni *Capability*.



Gambar 2. *Fraud Diamond* menurut Wolfe dan Hermanson (2004)

### 2.5 Jenis-jenis *Fraud*

Steve (2002) dalam Hutomo (2012) menjelaskan 5 jenis *fraud* sebagai berikut:

1. *Embezzlement employee*

Pencurian yang dilakukan oleh karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan.

2. *Management fraud*

Merupakan jenis *fraud* yang dilakukan oleh *top management* kepada *stockholders* dan pengguna laporan keuangan dengan cara memberikan informasi yang bias dalam laporan.

3. *Investment scam*

Jenis *fraud* yang dilakukan oleh perorangan kepada investor dengan melakukan kebohongan melalui penanaman modal.

4. *Vendor fraud*

Kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan/individu yang menjual barang atau jasa kepada perusahaan yang membeli barang atau jasa. *Fraud* ini dilakukan perusahaan dengan mengeluarkan tarif yang mahal dalam hal pengiriman barang.

#### 5. *Customer fraud*

*Fraud* yang dilakukan oleh pelanggan kepada perusahaan yang menjual barang atau jasa. Perusahaan menipu penjual agar mereka mendapatkan sesuatu yang lebih dari seharusnya.

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), mencari atau menemukan penyimpangan dalam suatu perusahaan itu sulit sebab penyimpangan memiliki sifat dasar yang tertutup. Oleh karena itu, ACFE membuat suatu klasifikasi yang disebut "*Fraud Tree*", yaitu sistem klasifikasi mengenai kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan di dalam suatu perusahaan. Secara umum, klasifikasi yang dilakukan terbagi menjadi tiga, yaitu:

##### 1. Penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*)

Penyalahgunaan terhadap aktiva tetap atau harta perusahaan yang digunakan untuk keuntungan pribadi.

##### 2. Pernyataan palsu (*fraudulent statement*)

Biasanya pernyataan dalam suatu laporan keuangan yang digunakan agar perusahaan dapat terlihat baik, padahal dalam kenyataannya tidak.

##### 3. Korupsi (*corruption*)

Tindakan yang dilakukan biasanya oleh satu atau lebih orang yang saling menguntungkan.

## **2.6 Sistem Pemerintahan Indonesia**

Secara teori, berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil. Namun dalam prakteknya banyak bagian-bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sehingga secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensiil dengan sistem pemerintahan parlemen. Apalagi bila dirunut dari sejarahnya, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan. Indonesia pernah menganut sistem kabinet parlementer pada tahun 1945 - 1949. kemudian pada rentang waktu tahun 1949 - 1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer yang semu.

Pada tahun 1950 - 1959, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Sedangkan pada tahun 1959 - 1966, Indonesia menganut sistem pemerintahan secara demokrasi terpimpin. Perubahan dalam sistem pemerintahan tidak hanya berhenti sampai disitu saja. Karena terjadi perbedaan pelaksanaan sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum UUD 1945 diamandemen dan setelah terjadi amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 - 2002. Berikut ini

adalah perbedaan sistem pemerintahan sebelum terjadi amandemen dan setelah terjadi amandemen pada UUD 1945 :

**Sebelum terjadi amandemen :**

- MPR menerima kekuasaan tertinggi dari rakyat
- Presiden sebagai kepala penyelenggara pemerintahan
- DPR berperan sebagai pembuat Undang – Undang
- BPK berperan sebagai badan pengaudit keuangan
- DPA berfungsi sebagai pemberi saran/pertimbangan kepada presiden / pemerintahan
- MA berperan sebagai lembaga pengadilan dan pengukir aturan yang diterbitkan pemerintah.

**Setelah Terjadi Amandemen:**

- Kekuasaan legislatif lebih dominan
- Presiden tidak dapat membubarkan DPR
- Rakyat memilih secara langsung presiden dan wakil presiden
- MPR tidak berperan sebagai lembaga tertinggi lagi
- Anggota MPR terdiri dari seluruh anggota DPR ditambah anggota DPD yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Dalam sistem pemerintahan presidensiil yang dianut di Indonesia, pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang menjadi perhatian. Selain itu, pengawasan rakyat terhadap pemerintahan juga kurang begitu berpengaruh karena



pada dasarnya terjadi kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan yang ada di tangan presiden. Selain itu, terlalu sering terjadi pergantian pejabat di kabinet karena presiden mempunyai hak prerogatif untuk melakukan itu.

## **2.7 Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintahan**

Mardiasmo (2009) menyatakan dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik, seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Akan tetapi, untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan.

Tujuan dari sektor publik adalah bukan untuk memaksimalkan laba seperti tujuan sektor swasta tetapi sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan publik seperti, pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik. Korupsi merupakan jenis kecurangan atau *fraud* yang sering terjadi di sektor pemerintahan. Korupsi merupakan perbuatan penyalahgunaan kekuasaan publik, demi keuntungan pribadi, penyalahgunaan terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi dapat membuat pelayanan pemerintah menjadi

tidak maksimal dikarenakan adanya penyaluran anggaran yang kurang sempurna sehingga masyarakat dirugikan karena tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparaturnya yang berkaitan.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kecurangan (*fraud*) :

Penelitian oleh Levi dkk (2007) dan Levi and Burrows (2008) secara konservatif memperkirakan tingkat kecurangan berada di wilayah Inggris 14 miliar poundsterling per tahun di Inggris saja. Hampir setengah ( 6 miliar poundsterling) dari perkiraan ini 14 miliar poundsterling hilang dari kecurangan di sektor publik. Mengingat skala masalah di sektor publik, langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini seharusnya penting dalam prioritas politik, mengingat iklim fiskal yang semakin ketat di sektor publik. Penipuan, bagaimanapun, relatif terbengkalai oleh akademisi dan pembuat kebijakan jika dibandingkan dengan kejahatan lainnya (Levi, 2007).

Wilopo (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh pengendalian internal birokrasi pemerintah serta perilaku tidak etis dari birokrasi terhadap kecurangan akuntansi di Badan Pengawas Keuangan (BPK). Data responden yang digunakan pada penelitian ini adalah para pejabat auditor yang bekerja sebagai pengawas dan pemeriksa pada Badan Pengawas Keuangan (BPK). Penelitian tersebut relevansi dengan penelitian ini adalah mempunyai persamaan pada objek penelitian yang akan diteliti yaitu pada sektor pemerintahan, metode yang digunakan penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk kuesioner.

Perbedaan pada penelitian ini yaitu dalam penelitian tersebut menggali persepsi auditor pemerintahan, sedangkan penelitian ini menggali persepsi auditee pemerintahan yaitu instansi yang diaudit untuk mengetahui faktor -faktor apa saja yang mempengaruhi fraud di sektor pemerintahan.

Pawi dkk. (2011) berpendapat bahwa pemerintah daerah Malaysia bertanggung jawab atas pengelolaan infrastruktur dan fasilitas publik yang benar untuk memastikan integritas dan tingkat kepuasan masyarakat dikelola dengan baik. Studi oleh Aziz dkk (2015) juga menyebutkan masalah yang diangkat oleh surat kabar lokal mengenai sektor publik Malaysia yang mengalami kesulitan dalam mengelola properti dan fasilitas mereka, yang pada akhirnya dapat merusak nilai integritas di sektor publik. Kegagalan pengelolaan aset yang efisien dan efektif telah menghasut pemerintah federal untuk menghadapi beberapa masalah, sehingga membebani otoritas dan publik.

Haniza Hanim, Norazidah dan Jamaliah (2017) menemukan hubungan positif antara unsur segitiga penipuan (tekanan, peluang dan rasionalisasi) dan kejadian penipuan di antara pegawai Polisi Royal Malaysian. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa setiap tindakan curang dapat dicegah bila karyawan memiliki integritas tinggi yang menuntut mereka untuk bertindak dengan penuh kejujuran dan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh organisasi.

Aishah (2017) melakukan penelitian tentang pemberitaan kasus-kasus korupsi di Malaysia melalui empat surat kabar umum dalam dua bahasa yaitu bahasa inggris dan melayu. Dimana hasilnya menunjukkan bahwa surat kabar

Inggris melaporkan kasus yang sedikit lebih tinggi daripada surat kabar Malaysia. Aishah berpendapat bahwa kurangnya integritas suatu lembaga terlepas dari sektor pemerintah ketika kepala departemen terlibat dalam kecurangan dengan menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Pemerintah perlu memikirkan langkah-langkah efektif untuk melawan kegiatan penipuan ini untuk memastikan sektor publik Malaysia diperintah kepercayaan etis dan publik dijunjung tinggi.

Sementara penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada faktor atau alasan bagi individu yang melakukan kecurangan, belum banyak penelitian yang berfokus pada pelaporan kecurangan oleh media. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi peran yang dimainkan oleh media dalam melaporkan kasus kecurangan yang melibatkan sektor publik atau dalam pemerintahan.

الجمعة الإسلامية الأندلسية

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang alasan penulis menggunakan metode kualitatif, alasan dalam memilih tempat penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data dan juga pengujian keabsahan data yang digunakan penulis dalam penelitiannya.

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan teknik *content analysis* untuk menyaring data dari media surat kabar. Perreault dan McCarthy (2006) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang berusaha menggali informasi secara mendalam guna melakukan analisis sehingga didapat hasil yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Adapun pengertian penelitian kualitatif dapat dilihat dari beberapa teori berikut ini:

a. Creswell dalam Herdiansyah (2010), menyebutkan:

*“Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, report detailed views of information, and conducts the study in a natural setting”.*

Artinya penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan pemahaman berdasarkan tradisi metodologi penyelidikan yang berbeda yang mengeksplorasi masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun gambaran yang kompleks dan

holistik, menganalisa kata-kata, melaporkan pandangan informasi yang terperinci, dan melakukan penelitian dalam lingkungan yang alami.

b. Meleong, mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah, 2010)

c. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010).

d. Sugiyono (2011), menyimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dari beberapa teori-teori di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dengan tujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Analisis isi (*content analysis*) adalah suatu analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Menurut Neuman (2014) langkah-langkah kerja metode analisis isi meliputi :

1. Merumuskan topik dan rumusan masalah.
2. Menentukan unit analisis (misal menentukan jumlah teks yang dijadikan sebuah kode) lalu melakukan sampling dan mengembangkan sampling terhadap sumber data.
3. Menyusun kategori pengkodean dan membuat kertas kerja (*worksheet*) untuk penyimpanan data.
4. Pendataan suatu sampel dokumen yang telah dipilih dan melakukan pengkodean.
5. Pembuatan skala dan item berdasarkan kriteria tertentu untuk pengumpulan data.
6. Penafsiran data yang di peroleh dan menarik simpulan.

### **3.2 Unit Analisis**

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data sesuai dengan pendapat menurut Umar (2005) menerangkan objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi obyek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan objek penelitian adalah ruang lingkup yang merupakan pokok persoalan dari suatu penelitian. Dan pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian oleh penulis adalah media surat kabar di Indonesia dan kasus-kasus korupsi yang terjadi pada sektor publik.

### **3.3 Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah. Instrumen penelitian dapat diartikan pula sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi semua alat yang bisa mendukung suatu penelitian bisa disebut instrumen penelitian (Sugiono, 2009).

Dalam penelitian kualitatif ini yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti atau periset itu sendiri dan teknik analisis isi yang digunakan. Periset adalah bagian integral dari data, artinya periset ikut aktif dalam menentukan jenis data yang diinginkan. Peneliti langsung mencari data dari sumber yang digunakan dan memilih data yang sesuai dengan kategori yang dipilih yaitu berita tentang korupsi di sektor publik Indonesia. Karena itu penelitian kualitatif bersifat subjektif dan desain riset dapat berubah atau disesuaikan dengan perkembangan riset.

### **3.4 Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data dari surat kabar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan konten analisis untuk



menyaring data media online yang memberitakan berita tentang kecurangan di sektor publik atau kita kenal tindakan korupsi lewat satu surat kabar terbaik di indonesia menurut *4Internasional Media and Newspapers* dalam kategori *Top100Asia*. Surat kabar tersebut adalah Kompas. Dimana Kompas merupakan surat kabar Indonesia yang meraih peringkat 13 dari total 100 surat kabar seluruh asia.

Adapun media online yang namanya sangat populer yaitu Detik.com, peneliti tidak menggunakan media online tersebut karna Detik.com tidak termasuk surat kabar yang menghasilkan media cetak seperti Kompas. Detik.com hanya merupakan portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia. Data diperoleh dengan mengakses laman surat kabar tersebut dan diamati dalam jangka waktu sepanjang tahun 2017.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Ada beberapa teknik atau metode pengumpulan data yang biasanya dilakukan oleh peneliti. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari metode yang ada tergantung masalah yang di hadapi (Kriyantono, 2009) dalam Sul itiyono (2015).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan buku Neuman (2014) tentang metode penelitian sosial adalah teknik analisis isi karna penelitian ini menganalisis konten dalam bentuk dokumen yang sudah ada. Dengan mengumpulkan berita tentang kasus-kasus korupsi yang terjadi di dalam

sektor pemerintahan Indonesia melewati pemberitaan media surat kabar terbesar di Indonesia yaitu Kompas.com.

Pemilihan media elektronik Kompas.com ini dikarenakan media ini merupakan media pemberitaan terbaik di Indonesia yang selalu menampilkan berita dari segala daerah di Indonesia dan sering diakses masyarakat. Berita-berita kasus korupsi ini dikumpulkan dengan mengakses situs berita tersebut sepanjang tahun 2017. Data kemudian digabungkan dan dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori yang sudah dipilih.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, *thematic analysis* digunakan sebagai alat untuk menganalisis data. Menurut Boyatzis (1980) *thematic analysis* merupakan cara mengidentifikasi tema-tema yang terpolakan dalam suatu fenomena. Tema-tema tersebut dapat diidentifikasi, dikodekan secara induktif (*data driven*) dari data kualitatif mentah (surat kabar, dokumen, text, dan sebagainya) maupun secara deduktif (*theory driven*) berdasarkan teori maupun hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini diidentifikasi secara induktif karena data yang dimiliki merupakan data mentah yang diperoleh melalui media surat kabar elektronik. Dalam melakukan analisa, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan.

Menurut Sekaran dan Bougie (2017) terdapat tiga langkah dalam analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data mengacu pada proses memilih, mengodekan, dan mengategorikan data. Penyajian data merujuk pada cara menunjukkan atau menyajikan data, yaitu dengan cara terorganisasi dan singkat. Langkah yang terakhir adalah

penarikan kesimpulan, yaitu menjawab pertanyaan penelitian dengan menentukan apa yang diwakili oleh tema yang teridentifikasi dengan mempertimbangkan penjelasan untuk pola dan hubungan yang diteliti atau dengan membuat kontras dan perbandingan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisa data dalam penelitian ini, pertama data dikelompokkan berdasarkan hari dan bulan sepanjang tahun 2017. Setelah data dikategorikan, data tersebut disajikan ke dalam bentuk tabel dengan menggunakan tabulasi *Spreadsheet*. Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah tersaji dalam bentuk tabulasi tersebut guna menjawab pertanyaan rumusan masalah dalam topik penelitian ini.

### **3.7 Pengujian Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif, data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu peneliti harus memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Cara pengumpulan data yang beragam tekniknya harus sesuai dan tepat untuk menggali data yang benar-benar diperlukan bagi penelitian. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Lincoln dan Guba (1985) dalam Leavy (2014:679), terdapat empat aspek dalam menilai kualitas penelitian kualitatif, yaitu kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

#### **1. Kepercayaan (*Credibility*)**

Kepercayaan (*credibility*) merupakan unsur-unsur yang memungkinkan orang lain untuk mengenali pengalaman yang terkandung dalam penelitian melalui interpretasi pengalaman peneliti, memeriksa keterwakilan data secara keseluruhan, pemeriksaan anggota yang melibatkan kembali peneliti untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti adalah representasi akurat dari pengalaman penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai dokumen untuk meningkatkan derajat kepercayaan penelitian. Peneliti menggunakan berbagai penelitian terdahulu yang berhubungan dengan fraud pada sektor publik dan jurnal yang menjadi landasan dalam menganalisis pola komunikasi pada media surat kabar online.

### 2. Keteralihan (*Transferability*)

Menurut Lincoln dan Guba (1985) dalam Leavy (2014:679), keteralihan merupakan kemampuan untuk mentransfer hasil penelitian dari satu kelompok ke kelompok lain atau deskripsi yang digunakan untuk memberikan informasi kontekstual yang terperinci kepada pembaca. Dalam penelitian ini, untuk memenuhi keteralihan (*transferability*) peneliti melakukan uraian secara teliti, rinci, jelas, dan dapat dipercaya mengenai obyek penelitian, permasalahan yang diteliti, dan sistematika dalam setiap pembahasan dari hasil yang didapat.

### 3. Kebergantungan (*Dependability*)

Menurut Lincoln dan Guba (1985) dalam Leavy (2014:679), kebergantungan dapat tercapai ketika peneliti memiliki rekan-rekan yang berpartisipasi dalam proses analisis. Dalam penelitian ini, uji kebergantungan dilakukan oleh dosen

pembimbing dengan cara mengaudit setiap proses dalam penelitian selama penelitian dilaksanakan.

#### 4. Kepastian (*Confirmability*)

Menurut Lincoln dan Guba (1985) dalam Leavy (2014:679), uji kepastian merupakan sikap kritis terhadap diri sendiri pada bagian dari penelitian tentang bagaimana prasangka sendiri dapat mempengaruhi penelitian. Peneliti merupakan pihak yang subjektif, untuk itu peneliti membutuhkan rekan dalam penelitian agar penelitian tersebut menjadi objektif. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing sebagai pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman menjadi pihak ketiga yang mengaudit selama proses penelitian, hingga kesimpulan dapat dicapai dan melakukan persetujuan terhadap penelitian yang dilakukan.

### **3.8 Tahap-tahap Penelitian**

Penelitian ini di bagi menjadi 4 tahap yaitu, tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap analisis, dan tahap penyusunan laporan akhir.

#### a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan adalah tahap awal yang dilakukan dalam penelitian dimana terdiri dari studi literatur dan pemilihan sumber data. Studi literatur merupakan langkah awal dari penelitian ini yang bertujuan untuk mempelajari dan mengumpulkan referensi yang berguna untuk menunjang penelitian dalam skripsi ini.

Setelah mendapatkan referensi yang cukup kemudian dilakukan proses pemilihan sumber data untuk menentukan data yang akan digunakan dalam

penelitian ini. Pemilihan sumber data ini dipilih berdasarkan surat kabar terbesar yang terdapat di Indonesia menurut beberapa survei.

#### b. Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data adalah tahap yang terdiri dari pengumpulan data dan pengelompokan data. Pengumpulan data merupakan langkah selanjutnya setelah memilih sumber data yang tepat untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dimana data-data tersebut dikumpulkan dan kemudian dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori.

#### c. Tahap Analisis

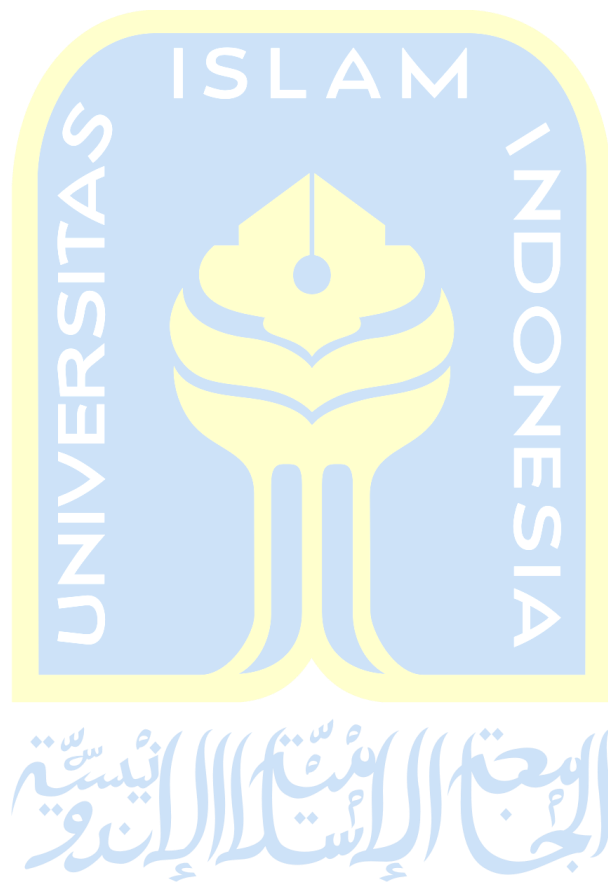
Kemudian setelah dilakukan pengelompokan dalam beberapa kategori lalu di lakukan analisis berdasarkan :

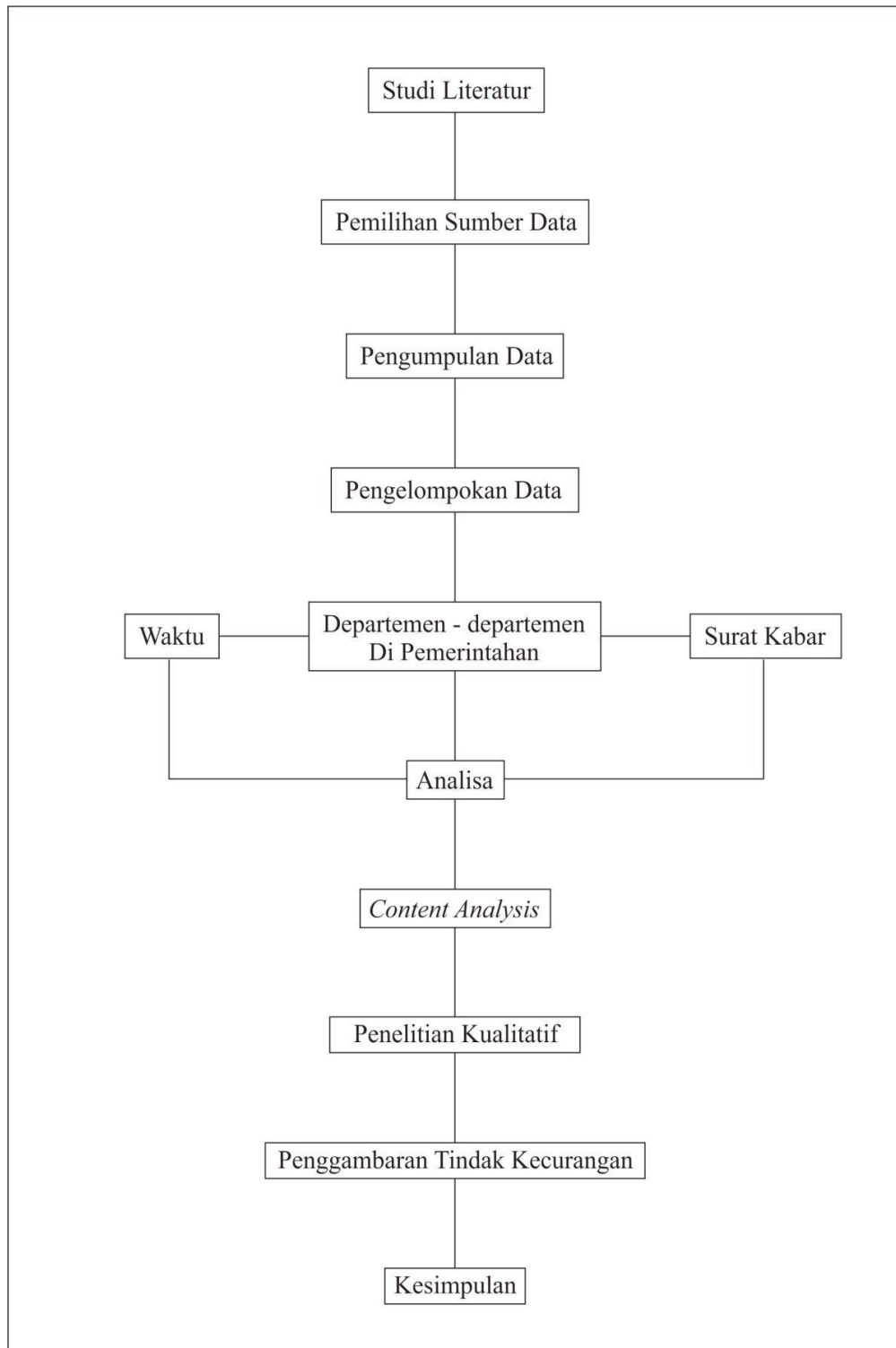
1. Waktu : Dalam satu tahun data dibedakan berdasarkan bulan terbit berita.
2. Departemen-departemendipemerintahan: Data dikelompokkan berdasarkan lembaga/departemen yang terlibat.
3. Surat Kabar: Data di kumpulkan berdasarkan media pemberitaan.

Dalam melakukan analisis penelitian ini , peneliti menggunakan konten analisis dimana analisis ini yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus.

#### d. Tahap Penyusunan Laporan Akhir

Tahap terakhir dalam penelitian ini yaitu tahap penyusunan laporan, berdasarkan hasil yang didapat menggunakan *software* Microsoft Excel 2010 dengan *manual spreadsheet* dari tahap-tahap sebelumnya yang kemudian dikumpulkan dan disimpulkan lalu disusun menjadi laporan akhir.





Gambar 3. Tahap-tahap Penelitian.



## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, penulis akan memaparkan hasil temuan dari fokus penelitian ini yaitu berita-berita kasus korupsi di sektor pemerintahan Indonesia melalui pengumpulan data yang telah dikumpulkan melalui berita di surat kabar Kompas.com sepanjang tahun 2017. Penulis juga akan memberikan pembahasan dan penjelasan atas hasil analisis dari data tersebut.

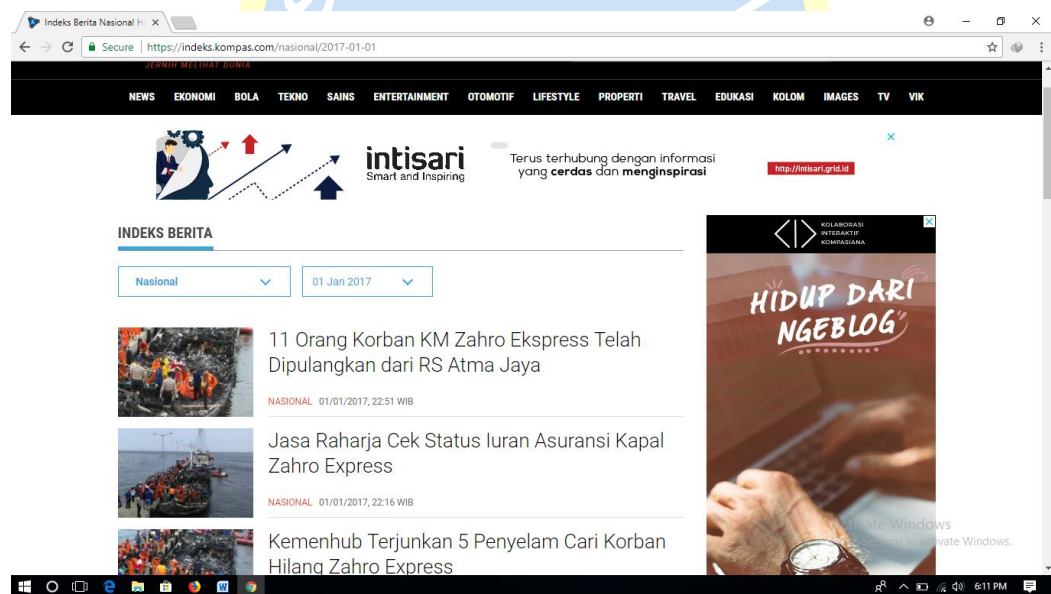
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti (Kountur, 2007). Dengan melakukan penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif maka peneliti harus memaparkan, menjelaskan, menggambarkan data yang diperoleh oleh peneliti melalui pengumpulan data yang sudah dilakukan.

#### **4.1 Profil Kompas.com**

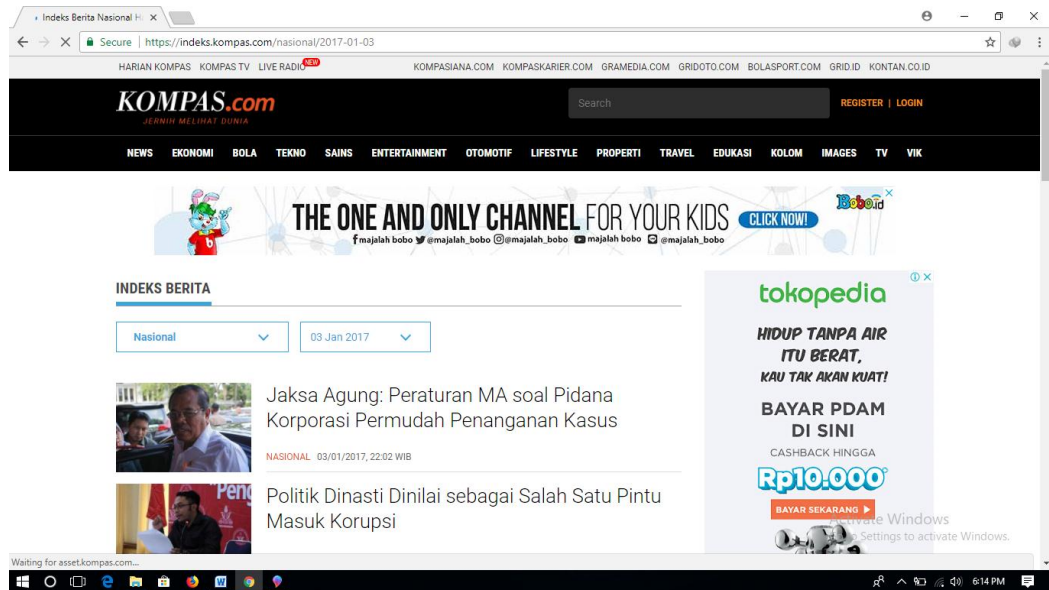
Kompas.com merupakan situs berita terpercaya di Indonesia. Hak cipta dan merek dagang Kompas.com dimiliki oleh PT Kompas Cyber Media, salah satu unit usaha Kompas Gramedia. Awalnya, Kompas.com berdiri pada tahun 1997 dengan nama Kompas Online. Saat itu, Kompas Online hanya berperan sebagai edisi internet dari Harian Kompas. Kemudian pada tahun 1998 Kompas Online mengganti namanya menjadi Kompas.com dan mulai berfokus pada

pengembangan isi, desain, dan strategi pemasaran yang baru. Sejak saat itulah Kompas.com memulai langkahnya sebagai portal berita terpercaya di Indonesia.

Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2008 Kompas.com tampil dengan perubahan penampilan yang signifikan. Mengusung ide “*Reborn*”, Kompas.com membawa logo, tata letak, hingga konsep baru di dalamnya. Menjadi lebih kaya, lebih segar, lebih elegan dan tentunya tetap mengedepankan unsur *user-friendly* dan *advertiser-friendly*.



Sinergi ini menjadikan Kompas.com sebagai sumber informasi lengkap, yang tidak hanya menghadirkan berita dalam bentuk teks, namun juga gambar, video, hingga live streaming. Perubahan ini pun mendorong bertambahnya pengunjung aktif Kompas.com di awal tahun 2008 yang mencapai 20 juta pembaca aktif per bulan, dan total 40 juta *page views/impression* per bulan. Saat ini, Kompas.com telah mencapai 120 juta *pageview* perbulan.



Pada tahun tersebut juga mulai ditampilkan *channel-channel* atau kanal-kanal di halaman depan Kompas.com. Kanal-kanal ini didesain sesuai dengan tema berita dan membuat setiap pengelompokan berita memiliki karakter. Kanal-kanal tersebut antara lain adalah:

1. KOMPAS Female Memuat informasi seputar dunia wanita: tips-tips seputar karier, kehamilan, trik keuangan serta informasi belanja
2. KOMPAS Bola Tempat akurat untuk mengetahui update skor, berita seputar tim dan pertandingan sepak bola.
3. KOMPAS Health Berisi tips-tips dan artikel tentang kesehatan, informasi medis terbaru, beserta fitur informasi kesehatan interaktif.
4. KOMPAS Tekno Mengulas *gadget-gadget* terbaru di pasaran, menampilkan *review* produk dan beragam berita teknologi.
5. KOMPAS Entertainment Menyajikan berita-berita selebriti, ulasan film, musik dan hiburan dalam dan luar negeri.

6. KOMPAS Otomotif Menampilkan berita-berita seputar kendaraan, *trend* mobil dan motor terbaru serta tips-tips merawat kendaraan.
7. KOMPAS Properti Memuat direktori lengkap properti dan artikel tentang rumah, apartemen serta tempat tinggal.
8. KOMPAS Images Menyajikan foto-foto berita berkualitas dalam resolusi tinggi hasil pilihan editor foto Kompas.com.
9. KOMPAS Karier Kanal yang tak hanya berfungsi sebagai direktori lowongan kerja, namun juga sebagai *one-stop career solution* bagi para pencari kerja maupun karyawan.

Kompas.com juga telah menciptakan komunitas menulis dengan konsep *citizen journalism* dalam Kompasiana. Setiap anggota Kompasiana dapat mewartakan peristiwa, menyampaikan pendapat dan gagasan serta menyalurkan aspirasi dalam bentuk tulisan, gambar ataupun rekaman audio dan video. Kompasiana juga melibatkan kalangan jurnalis Kompas Gramedia dan para tokoh masyarakat, pengamat serta pakar dari berbagai bidang, keahlian dan disiplin ilmu untuk ikut berbagi informasi, pendapat dan gagasan. Kompasiana, yang setiap hari melahirkan 300 hingga 400 tulisan telah berhasil membangun komunitas jurnalisme warga yang mencapai 50.000.

Sebagai portal berita yang mengikuti perkembangan teknologi terkini, kini selain bisa diakses melalui *handphone* atau dapat diunduh sebagai aplikasi gratis di *smartphone* BlackBerry, Kompas.com juga tampil dalam format iPad dan akan terus tumbuh mengikuti teknologi yang ada.

Pada tahun 2013, Kompas.com kembali melakukan perubahan yaitu, tampilan halaman yang lebih rapi dan bersih serta fitur baru yang lebih personal. Setiap orang memiliki preferensi dan kebutuhan berita yang berbeda. Kompas.com mencoba memahami kebutuhan pembaca yang beragam dengan menghadirkan fitur Personalisasi. Jadi, pembaca dapat dengan mudah memilih sendiri berita apa yang ingin mereka baca. Pada tahun 2016, Kompas.com berhasil masuk kategori *2016 Newspaper Web Rankings / Asia* dalam *Top 100 Newspapers in Asia* dan menduduki peringkat 13.



#### 4.2 Hasil Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah berita selama tahun 2017 berdasarkan jenis-jenis kecurangan yang sudah dipilih. Pendistribusian tiap kecurangan atau disini lebih mengacu pada kasus korupsi pada sektor pemerintahan Indonesia ditunjukkan pada lima tabel yang masing-masing

memperlihatkan hasil dari pengumpulan dan pengkelompokan data yang dilakukan peneliti.

### 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

#### 4.3.1 Distribusi Surat Kabar untuk Kecurangan pada Sektor Pemerintahan Berdasarkan Bulan

Tabel 4.1  
Distribusi surat kabar untuk kecurangan  
pada sektor pemerintahan berdasarkan bulan

Bulan	Surat Kabar Kompas
Januari	201
Februari	110
Maret	393
April	171
Mei	316
Juni	270
Juli	295
Agustus	346
September	393
Oktober	246
November	368
Desember	145
<b>Total</b>	<b>3,254</b>

Pada tabel 4.1 merupakan pendistribusian berita kasus korupsi di surat kabar Kompas.com berdasarkan bulan beredarnya berita tersebut. Berita dikumpulkan setiap hari dalam satu tahun dengan dikelompokkan perbulannya. Kemudian semua berita yang terkumpul di kelompokkan lagi ke beberapa bagian. Pada tabel pertama ini menunjukkan bahwa berita korupsi tertinggi diberitakan pada bulan Maret dan September yaitu ada 393 berita dibandingkan dengan pemberitaan kasus korupsi terendah pada bulan Februari ada 110 berita.

Dari total pemberitaan mengenai tindak kecurangan yang terjadi pada sektor pemerintahan Indonesia ada sebanyak 3ribuan berita.

Ternyata tidak sedikit pemberitaan mengenai tindak kecurangan ini. Dimana sebagian berita korupsi yang diberitakan banyak yang menyita perhatian publik karena yang terlibat mayoritas tokoh-tokoh atau nama-nama besar di Indonesia. Berita yang paling tinggi frekuensi pemberitaannya pada bulan Maret dan September adalah kasus e-KTP yang sangat ramai di perbincangkan dimana pada bulan Maret itu sendiri terdapat sebanyak 278 berita dan untuk bulan September ada sebanyak 195 berita yang memberitakan kasus e-KTP karena ternyata melibatkan sejumlah nama besar dan pejabat tinggi di pemerintahan Indonesia.

Kasus ini juga diberitakan non-stop sepanjang tahun 2017 bahkan sejak tahun-tahun sebelumnya kasus ini sudah sering diberitakan. Kasus ini sangat menyita publik dan menjadi panjang karena tindak kecurangan ini yang sangat merugikan negara serta masyarat Indonesia bahkan juga langsung terkena imbasnya. Pemberitaan kasus ini juga sudah terjadi sejak tahun 2012 setelah Kemendagri melaksanakan proyek pengadaan KTP Elektronik ini pada tahun 2011-2012. Kasus ini juga melibatkan beberapa pemenang tender pengadaan e-KTP dan diduga ada aliran dana dari pemenang tender ke sejumlah pihak, termasuk wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pada bulan Januari hingga Februari berita yang paling banyak diberitakan dan cukup menyita perhatian publik adalah berita kasus korupsi yang melibatkan hakim di mahkamah konstitusi Indonesia yaitu Patrialis Akbar. Beliau diduga

menerima suap dari pengusaha impor daging yaitu Basuki Hariman. Pada akhirnya beliau diberi vonis hukuman selama 8 tahun penjara dengan denda Rp 300 juta. Pada bulan Maret berita mengenai kasus e-KTP mulai banyak diberitakan. Bahkan untuk bulan Maret ini ada 278 berita mengenai kasus e-KTP diikuti bulan-bulan selanjutnya kasus korupsi ini mendominasi berita di Indonesia.

Hingga puncak pemberitaan kasus korupsi e-KTP ini ada dibulan November sebanyak 311 berita atau 84,5% yang memberitakan kasus ini, karena pada bulan November tersangka yang juga merupakan tokoh yang cukup terkenal di Indonesia yaitu Setya Novanto akhirnya setelah banyak menghindar dari pemeriksaan dijadikan tersangka oleh hakim pada 31 Oktober 2017. Sebelumnya pada bulan Juli beliau sudah pernah ditetapkan menjadi tersangka keempat dalam dugaan kasus korupsi e-KTP. Tetapi beliau mengajukan praperadilan dan dikabulkan sehingga status tersangkanya tidak sah, tetapi tidak lama kemudian beliau kembali ditetapkan menjadi tersangka. Pada tanggal 16 November saat beliau dipanggil KPK, mobil yang beliau tumpangi menabrak tiang lampu. Kejadian ini sangat menyita perhatian publik dan ramai diberitakan di semua media pemberitaan di Indonesia. Dan pada tanggal 17 November beliau langsung dibawa ke gedung KPK dan menjadi tahanan KPK. Pada tanggal 13 Desember beliau menghadiri sidang perdana pokok perkara di Pengadilan Negeri Tipikor sampai sekarang persidangan masih berlangsung.



### 4.3.2 Distribusi Kasus Kecurangan Berdasarkan Jenis-Jenis Kecurangan

Tabel 4.2

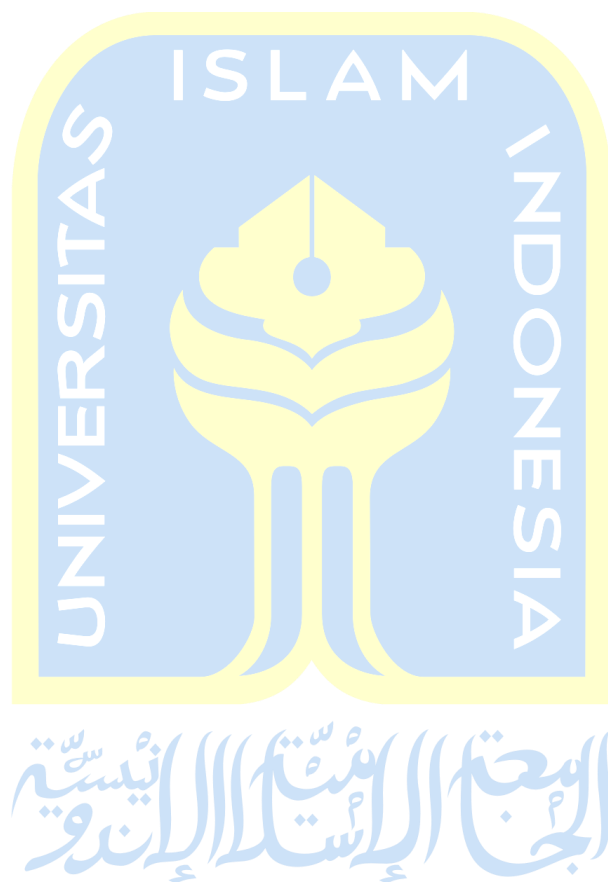
Distribusi kasus kecurangan berdasarkan jenis-jenis kecurangan

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	3,181
2	25
3	48
<b>Total</b>	<b>3,254</b>

Adapun jenis kasus kecurangan atau penipuan yang melibatkan layanan publik yang diberitakan oleh surat kabar, penelitian ini telah mengkategorikan jenis-jenis kecurangan ke dalam tiga bentuk kecurangan yaitu Korupsi, Penyalahgunaan Aset dan Lain-Lain. Korupsi disini adalah perilaku tidak jujur oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan sering kali melibatkan tindakan yang tidak terlegitimasi, tidak bermoral, atau tidak kompatibel dengan standar etis. Ada beberapa jenis korupsi contohnya adalah penyuapan dan persekongkolan tender. Penyalahgunaan aset disini adalah pencurian aset perusahaan atau lembaga oleh pegawainya dengan berbagai cara seperti penggelapan dana perusahaan. Untuk penelitian sebagian besar kasus yang diberitakan merupakan jenis kecurangan tindak pidana korupsi diikuti kasus yang dengan jenis *fraud* Lain-Lain kemudian jenis *fraud* penyalahgunaan aset.

Pada table 4.2 dapat dilihat hasil dari pengumpulan data yang telah dilakukan , terdapat sebanyak 3.012 atau 97,7 % berita yang masuk dalam jenis fraud korupsi. Untuk jenis penyalahgunaan asset ada sebanyak 25 atau 0,76% berita dan terakhir untuk berita yang di kategorikan lain-lain ada sebanyak 48

atau 1,47% berita sepanjang tahun 2017. Bisa dilihat dominan berita berjenis *fraud* korupsi dari pada penyalahgunaan aset yang terjadi di Indonesia.



### 4.3.3 Distribusi Surat Kabar untuk Kecurangan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Tabel 4.3  
Distribusi surat kabar untuk kecurangan berdasarkan daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	2,712	18	45	2,775
Jawa Tengah	3			3
Buton	11			11
Cimahi	6			6
Klaten	13			13
Kebumen	2			2
Nganjuk	20			20
Sumatera Barat	8			8
Tanggamus	1			1
Maluku	41			41
Papua	6			6
Madiun	11			11
NTB	3			3
Bali	1			1
Surabaya		2		2
Manado	15			15
Banjarmasin	9			9
Sumatera Utara	20			20
Banten	16			16
Jawa Timur	6			6
Bengkulu	50			50
Sulawesi Tenggara	9			9
Pamekasan	38			38
Aceh Barat		1		1
Riau	6			6
Malang	45			45
Mojokerto	39			39
Tegal	24			24
Cilegon	23			23
Kutai Kartanegara	25			25
Konawe	7			7
Dumai	2			2
Subang	1			1
Surakarta	2			2
Jambi	13			13
<b>Total</b>	<b>3,188</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>3,254</b>

1- korupsi

2-Penyalahgunaan Aset

3 -Lain-Lain

Pada table 4.3 ini memperlihatkan bagaimana kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia berdasarkan daerah atau kota yang tersangkut kasus korupsi. Sebagaimana dari hasil pengumpulan berita sepanjang tahun 2017 ini yang paling banyak diberitakan adalah kasus e-KTP yang terjadi di pemerintahan pusat yaitu Jakarta. Dari tabel bisa dilihat untuk kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia yaitu ada 2,775 berita karena kebanyakan berita kasus korupsi bertingkat pemerintahan pusat sehingga berita-berita tersebut dimasukkan ke kota Jakarta.

Berita mengenai jaksa Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar juga tidak sedikit diberitakan beberapa bulan pada tahun 2017 yaitu kasus dimana Patrialis Akbar diduga menerima suap dari pengusaha impor daging , Basuki Hariman dan stafnya Ng Fenny. Akhirnya putusan hakim pada siding tipikor menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan denda 300 juta subsidi 3 bulan kurungan. Disusul kota Bengkulu dengan 50 berita mengenai berita kasus korupsi yang melibatkan kejaksaan tinggi yang terkait kasus suap pengumpulan bukti dan keterangan proyek Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Bengkulu tahun 2015-2016. Kemudian ada kota Malang dengan 45 berita mengenai pemeriksaan terhadap walikota Malang Mochammad Anton dan enam orang tersangka lain dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemerintahan Kota Malang tahun anggaran 2015.

#### 4.3.4 Distribusi Surat Kabar untuk Kecurangan Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Tabel 4.4  
Distribusi surat kabar untuk kecurangan  
berdasarkan tingkat pemerintahan

Tingkat Yuridiksi	Jenis-Jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	2,712	18	45	2,775
Daerah	476	3		479
<b>Total</b>	<b>3,188</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>3.254</b>

1- korupsi

2- Penyalahgunaan Aset

3 -Lain-Lain

Sistem pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan menteri-menteri negara. Sebagai lembaga legislatif pemerintahan pusat adalah DPR dan MPR. Pemerintahan ini berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia, yang saat ini adalah DKI Jakarta. Pemerintahan daerah adalah organisasi pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dan asas perbantuan dalam sistem NKRI. Penyelenggara pemerintahan daerah mencakup gubernur, bupati, walikota, dan perangkatan lainnya (kepala dinas, kepala badan, dan unit-unit kerja lain yang diatur oleh Sekretaris Daerah). Lembaga Legislatif yang berada di daerah, yaitu DPRD I untuk tingkat provinsi dan DPRD II untuk tingkat kabupaten dan walikota.

Pada tabel 4.4 dapat dilihat untuk tingkat pemerintahan pusat ada 2,712 atau 83,3 % dari total berita dengan jenis fraud korupsi, untuk jenis fraud

penyalahgunaan aset sebanyak 18 berita dan untuk jenis lain-lain sebanyak 45 berita. Untuk tingkat pemerintahan daerah ada sebanyak 476 atau 14,6 % berita dengan jenis fraud korupsi , untuk yang termasuk jenis penyalahgunaan aset ada 3 berita saja dan tidak ada untuk jenis lain-lain. Jadi bisa dikatakan mayoritas kasus-kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2017 ini adalah pemerintahan pusat yang banyak terlibat dalam kasus korupsi. Dan tidak sedikit tokoh pemerintahan yang terlibat korupsi. Hal ini jadi gambaran seperti apa sebenarnya kinerja para pejabat negara yang sudah di beri amanah oleh masyarakat untuk mengurus negara kita. Walaupun tidak semua pejabat atau tokoh pemerintahan yang terlibat kasus korupsi tetapi tidak sedikit pula yang ikut serta dalam melakukan tindak kecurangan korupsi ini. Mayoritas kasus-kasus korupsi yang ada dilakukan berkelompok sehingga tidak sedikit yang terlibat dalam satu kasus korupsi contohnya kasus e-KTP yang ternyata banyak sekali pejabat dan oknum-oknum yang terlibat didalamnya.

الجمعة الإسلامية الأندلسية

### 4.3.5 Distribusi Surat Kabar untuk Kecurangan Berdasarkan Departemen-Departemen

Tabel 4.5

Distribusi surat kabar untuk kecurangan berdasarkan Departemen-departemen

NO	Departemen-Departemen	Frekuensi
1	Badan Keamanan Laut	57
2	Ditjen Pajak	71
3	Kasus E-KTP (Kemendagri)	1,673
4	DPR RI	31
5	Pemerintahan Kutai Kartanegara	30
6	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)	57
7	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	17
8	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	7
9	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kebumen	5
10	Garuda Indonesia	45
11	Pertamina	8
12	PT PAL Indonesia	23
13	PT Pelindo II(BUMN)	3
14	Asuransi Jasindo	2
15	PT Garam (BUMN)	7
16	PT KAI	2
17	Perusahaan Listrik Negara (PLN)	2
18	Mahkamah Konstitusi	213
19	Perusahaan Umum Perhutani (Berdikari) Jawa Tengah	12
20	DPD RI	8
21	Ditjen P2KTrans Kementerian Tenaga Kerja	17
22	Menteri Kesehatan	71
23	Pemerintahan Provinsi DKI (Podomoro land)	14
24	Otorisasi Jasa Keuangan (OJK)	8
25	Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan	5
26	Menteri Pemuda dan Olahraga(Hambalang)	21
27	Pemerintahan Daerah Madiun	15
28	Menteri Pertanian	11
29	Mahkamah Agung	6
30	Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	9
31	Kepala Kejaksaan Negeri Praya	3
32	Pemerintahan Daerah Cimahi	6
33	Pemerintahan Daerah Pamekasan	35
34	Dinas Pekerjaan Umum Papua	7
35	Atase Imigrasi	11
36	Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan	9
37	Pemerintahan Daerah Riau	5

38	Lain- Lain	54
39	Pemerintahan Daerah Tanggamus	5
40	Pemerintahan Daerah Klaten	22
41	Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	4
42	Pemerintahan Daerah Nganjuk	10
43	Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara	25
44	Pemerintahan Provinsi Banten	25
45	Rumah Sakit Udayana	11
46	Kejaksaan Agung	18
47	Perlindungan Hortikultura Kementerian Pertanian	5
48	Asian Games ( INASGOC)	1
49	PORLI	6
50	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)	44
51	Kwarda Pramuka DKI Jakarta	3
52	Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama	50
53	Tentara Nasional Indonesia(TNI)	21
54	Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia	68
55	Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (PDTT)	22
56	Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	22
57	Kejaksaan Tinggi Bengkulu	60
58	Bank Pembangunan Daerah Papua	10
59	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang JATIM	18
60	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara	32
61	Pemerintahan Daerah Malang	45
62	Menteri Desa	32
63	Kementerian Hubungan	35
64	Pemerintahan Kota Tegal	24
65	Mahkamah Agung	12
66	PDAM Banjarmasin	9
67	Pemerintahan Kota Cilegon	22
68	Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	10
69	Kementerian Dalam Negeri	3
<b>TOTAL</b>		<b>3,254</b>

Berita yang dikumpulkan juga kemudian dikelompokkan berdasarkan departemen yang terlibat dalam pemberitaan kasus-kasus yang ada. Setelah pengumpulan data dilakukan, terkumpul sebanyak 69 departemen di pemerintahan Indonesia. Pada tabel 4.5 ini memperlihatkan departemen-



departemen atau pihak-pihak yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi di Indonesia. Peringkat pertama yang paling banyak diberitakan yaitu Kementerian Dalam Negeri untuk kasus e-KTP. Karena proyek e-KTP itu sendiri merupakan proyek yang diselenggarakan oleh Kemendagri dan dipercayakan ke beberapa departemen lainnya. Tetapi sayangnya disalahgunakan oleh beberapa departemen yang terlibat dalam proyek e-KTP ini.

Kemudian untuk departemen kedua yang paling banyak terlibat kasus korupsi yaitu Mahkamah Konstitusi. Ada dua hakim yang terlibat kasus korupsi di Mahkamah Konstitusi ini yaitu Akil Mochtar dan Patrialis Akbar. Akil Mochtar terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menerima hadiah dan tindak pidana pencucian uang terkait kasus sangketa pilkada di MK yaitu pilkada Kabupaten Gunung Mas (Rp 3 miliar), Kalimantan Tengah (Rp 3 miliar), Pilkada Lebak Banten (Rp 1 miliar), Pilkada Empat Lawang (Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS), serta Pilkada Kota Palembang (sekitar Rp 3 miliar). Sedangkan kasus Patrialis Akbar ditetapkan sebagai tersangka karena beliau disangka menerima suap sebesar 20.000 dollar AS dan 200.000 dollar Singapura atau total sekitar Rp. 2,15 miliar dari pengusaha impor daging Basuki Hariman.

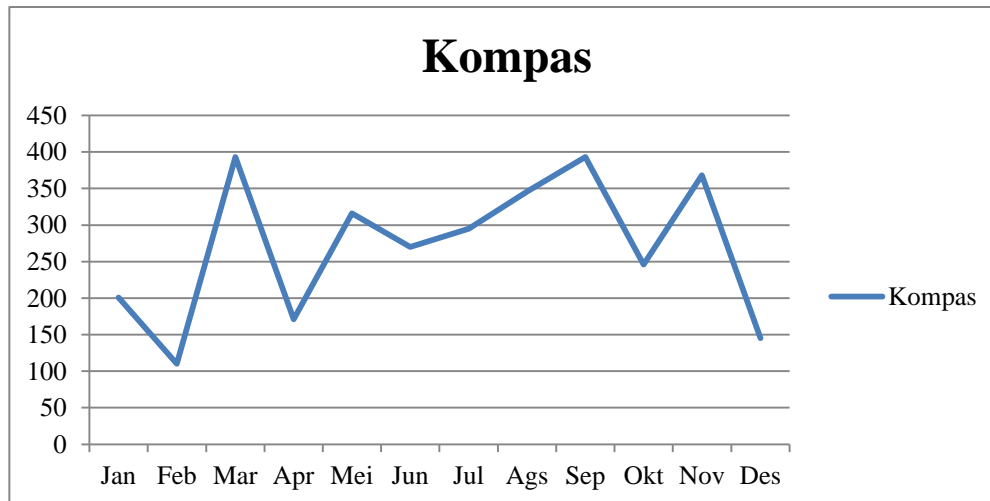
Departemen Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari juga ternyata diberitakan terlibat kasus korupsi pengadaan alat kesehatan pada tahun 2005. Dalam kasus ini, Siti didakwa melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp. 6.148.638.000 dan diduga menerima suap sebesar Rp 1.875.000.000 supaya menyetujui revisi anggaran untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) I, serta memperbolehkan PT Graha

Ismaya sebagai supplier pengadaan alkes I. Namun Siti bersikeras tidak mengakui keterlibatan dirinya dalam kasus tersebut tetapi beliau justru mengembalikan uang sebesar Rp. 1,350 miliar kepada negara melalui KPK.

Departemen selanjutnya yang termasuk paling banyak diberitakan dalam kasus korupsi yaitu Ditjen Pajak, dimana kasus ini melibatkan penanganan pajak PT Eka Prima Ekspor dan juga melibatkan adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyono. Diduga Arif menjadi salah satu pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan persoalan pajaknya PT Eka Prima Ekspor sehingga mengakibatkan tunggakan pajak perusahaan tersebut sebesar Rp 52,3 miliar untuk masa pajak Desember 2014 dan Rp 26,4 miliar untuk masa pajak Desember 2015 menjadi nihil.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia juga ikut tersangkut kasus korupsi lebih tepatnya kasus suap seorang Auditor Madya pada Sub Auditorat VII B2 BPK RI Sigit Yugoharto. Beliau diduga menerima suap dari Setia Budi yang merupakan General Manager PT Jasa Marga cabang Purbaleunyi terkait temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) BPK. Dalam PDTT tersebut pada tahun 2015-2016 terindikasi terdapat kelebihan pembayaran terkait pekerjaan pemeliharaan periodik, rekonstruksi jalan, dan pengecatan marka jalan yang tidak sesuai di Purbaleunyi.

#### 4.3.6 Pola Pemberitaan Berita Korupsi Tahun 2017



Gambar 4. Grafik berita selama tahun 2017 di Kompas.

Pola pemberitaan kasus korupsi pada sektor pemerintahan sepanjang tahun 2017 dapat dilihat dari gambar 4. Pada bulan Maret berita kasus korupsi paling banyak diberitakan dimana ada kasus korupsi E-KTP dan kasus hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang ramai diperbincangkan dimedia elektronik. Sedangkan pada bulan Februari pemberitaan kasus korupsi tidak begitu ramai diberitakan dimedia elektronik. Pemberitaan kasus korupsi meningkat ketika terdapat kasus korupsi yang besar atau melibatkan banyak oknum yang memiliki nama besar dan jabatan tinggi di Indonesia, sehingga masyarakat pun ikut memerhatikan perkembangan kasus-kasus tersebut.

#### 4.4 Kasus Korupsi E-KTP

Proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau yang biasa disebut e-KTP dimulai Kementerian Dalam Negeri sebagai pelaksana, pada tahun 2011-2013. Kasus e-KTP merupakan kasus terbesar yang sangat menyita

perhatian penduduk Indonesia sebagai mega-skandal karena melibatkan sejumlah nama penting di Republik ini dan yang paling ‘mencengangkan’ dalam kasus ini adalah berapa jumlah dana yang diduga dikorupsi. Dari nilai proyek Rp5,9 triliun, KPK menyebut dana yang dikorupsi mencapai Rp2,3 triliun. Diantara nama-nama besar yang diduga terlibat mega skandal kasus e-KTP, antara lain Ketua DPR Setyo Novanto yang disebut-sebut menerima Rp574 miliar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang diduga menerima Rp1,2 miliar, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang disebut-sebut menerima Rp7 miliar, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang juga disebut-sebut menerima Rp60 miliar.

Kasus ini terbongkar karena ditemukannya sejumlah kejanggalan pada tahap pembahasan anggaran. Kejanggalan dalam proses tender juga sudah tercium oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sejak September 2012. Ketika itu pemenang tender pengadaan e-KTP adalah konsorsium PT Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Konsorsium ini melibatkan Perum PNRI, PT Sucofindo, PT Sandhipala Arthapura, PT Len Industri, dan PT Quadra Solution sebagai penyedia perangkat keras dan perangkat lunak. KPK menduga ada aliran dana dari pemenang tender ke sejumlah pihak, termasuk wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kini kasus e-KTP baru mendakwa dua mantan pejabat Dirjen Dukcapil Kemendagri, masing-masing Irman selaku mantan Dirjen dan Sugiharto selaku mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Dalam persidangan Jaksa menuding Irman mengarahkan

Sugiharto untuk membuat spesifikasi teknis pembuatan e-KTP yang mengarah ke produk tertentu, dengan secara langsung menyebut merek. Maka KPK mendalami keterangan kedua tersangka yang kini menjadi terdakwa dengan memeriksa 294 saksi dalam kurun waktu hampir 3 tahun. Selain itu, KPK juga menyita Rp247 miliar yang terkait dengan kasus mega skandal korupsi itu. Selain dua terdakwa, KPK juga telah memeriksa 19 politikus yang menjabat sebagai wakil rakyat di DPR pada 2011-2012. Di antaranya Chairuman Harahap yang kala itu menjabat ketua komisi II (komisi pemerintahan DPR) dan Setya Novanto, yang saat itu menduduki posisi ketua fraksi Partai Golkar.

Taksiran kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun bukanlah nilai kecil. Coba bandingkan dengan kasus-kasus lain yang ditangani KPK, sebut saja dugaan kasus korupsi pembangunan pusat olahraga Hambalang di Bogor Jawa Barat senilai Rp1,2 triliun yang disebut KPK mengakibatkan kerugian negara Rp706 miliar. Kasus besar lainnya yang pernah heboh saat tersangka hendak ditangkap adalah dugaan kasus korupsi pengadaan simulator surat izin mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas Polri yang merugikan negara Rp121 miliar dan dugaan kasus korupsi komunikasi radio terpadu di Kementerian Kehutanan yang merugikan negara Rp89,3 miliar.

#### **4.5 Kesimpulan**

Pemberitaan berita tindak kecurangan atau kasus korupsi lebih tepatnya pada sektor pemerintahan di Indonesia sangat menyita perhatian masyarakat dan banyak yang mengikuti alur perkembangan tiap kasus yang terjadi. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Malaysia,

pemberitaan di Indonesia mengenai kasus-kasus kecurangan ini jauh lebih banyak dari pada pemberitaan di Malaysia. Sudah menjadi pusat perhatian di media surat kabar Indonesia karena pengelolaan dana publik merupakan perhatian publik. Bisa dilihat dari besar frekuensi pemberitaan di Kompas ini mengenai berita korupsi yang melibatkan berbagai pihak di pemerintahan pusat maupun daerah dan tidak sedikit negara kita dirugikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan tamak atau rakus.

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti pola dan frekuensi pemberitaan tindak kecurangan pada sektor pemerintahan Indonesia untuk tahun 2017 melalui surat kabar online kompas. Dari pengumpulan data yang sudah dilakukan dan dianalisis dapat disimpulkan bahwa pemberitaan tindak kecurangan di sektor pemerintahan Indonesia pada tahun 2017 yang paling besar frekuensi pemberitaannya dan paling menyita perhatian masyarakat adalah mega skandal kasus e-KTP yang melibatkan beberapa pejabat , nama besar, dan perusahaan yang memenangkan tender proyek e-KTP tersebut dan merugikan negara tidak sedikit yaitu sebesar Rp 2,3 Triliun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan di analisis seperti yang telah diuraikan dalam Bab Pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa didapatkan lima kasus terbesar yang paling banyak diberitakan sepanjang tahun 2017 sebagai berikut:

1. Kasus e-KTP menjadi kasus yang paling diperhatikan karena menarik perhatian semua kalangan masyarakat Indonesia. Banyaknya oknum yang terlibat seperti pejabat negara yang seharusnya melindungi dan membantu memfasilitasi rakyatnya justru melakukan tindak kecurangan yang sangat merugikan negara dan masyarakat langsung merasakan dampaknya. Kasus ini sudah bertahan sejak tahun 2012 hingga saat ini masih berjalan dan masyarakat juga mengikuti perkembangan kasus ini.
2. Kasus hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar juga cukup menyita perhatian Indonesia karena lembaga pemerintahan ini seharusnya menjadi alat keadilan negara kita tetapi justru tercoreng karena kecurangan yang dilakukan seorang hakim. Diduga menerima suap dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman. Patrialis Akbar dinyatakan bersalah dan di vonis 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp 300 juta.
3. Pengadaan alat kesehatan tahun 2005 yang diselenggarakan oleh Menteri Kesehatan juga terlibat kasus korupsi. Siti Fadilah selaku mantan Menteri

Kesehatan pada saat itu diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan menerima suap. Setelah terbukti bersalah oleh majelis hakim beliau di pidana 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta dengan subside 2 bulan kurungan.

4. Ditjen Pajak tersangkut kasus penanganan pajak PT Eka Prima Ekspor. Adanya persoalan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) PT EKP oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing( KPP PMA) Enam Kalibata. Selain direktur pajak, adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyoyuga ikut terlibat dalam kasus pajak ini. Ada tindak penyuapan juga disini dimana PT EKP memberi imbalan sebesar Rp 6 milyar kepada Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak. Hal itu dilakukan untuk membuat tagihan pajak PT EKP sebesar Rp 52,3 milyar tahun 2014 dan Rp 26,4 milyar tahun 2015 menjadi nihil.
5. Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia juga ikut terlibat kasus suap dimana auditor BPK diduga menerima suap dari manager Jasa Marga Purbaleunyi terkait temuan PDTT yaitu ditemukan kelebihan pembayaran terkait pekerjaan pemeliharaan periodik, rekontruksi jalan, dan pengecatan marka jalan yang tidak sesuai.

Hasil dari studi terbatas ini dapat menunjukkan integritas yang longgar di sektor pemerintah ketika kepala departemen terlibat dalam tindak korupsi dengan menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Pemerintah perlu memikirkan langkah-langkah efektif untuk melawan tindak kecurangan ini untuk



memastikan sektor pemerintahan Indonesia diatur secara etis dan kepercayaan publik ditegakkan. Namun, hasil penelitian ini mungkin tidak digeneralisasikan karena keterbatasan jumlah sampel yang dipilih yang terbatas hanya satu tahun.

## 5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan diatas maka implikasi dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu terutama dalam penelitian mengenai kasus-kasus korupsi di Indonesia. Diharapkan juga mampu menambah wawasan mengenai pola dan frekuensi pemberitaan kasus korupsi di Indonesia untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang sejenis.
2. Bagi Pemerintah, dalam hal ini semua kalangan pemerintahan yang memiliki kebijakan bisa mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum koruptor dan membuat peraturan yang lebih ketat dan bisa mempersempit celah kesempatan para oknum yang ingin melakukan korupsi.
3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan pembaca atau masyarakat mengenai pola dan frekuensi kasus korupsi melalui media elektronik Kompas.com yang terjadi di Indonesia dan bisa memberikan kontribusi dalam pencegahan korupsi di lingkungan sekitar pembaca atau masyarakat.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam proses penelitian yang dilakukan terdapat keterbatasan yang dihadapi, keterbatasan tersebut antara lain:

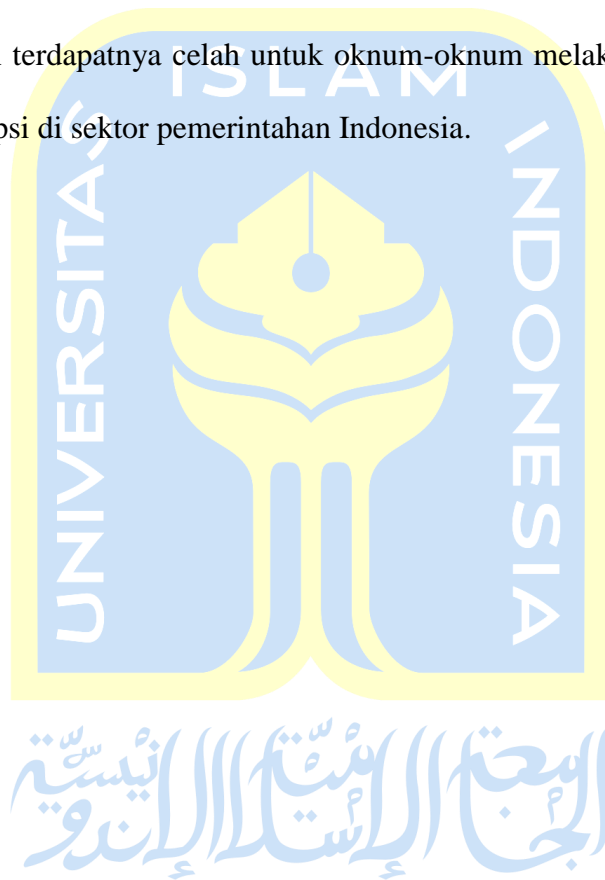
1. Objek penelitian berfokus terhadap tindak kecurangan korupsi, penyalahgunaan aset, dan lain-lain.
2. Sumber data yang digunakan hanya satu surat kabar online.
3. Data yang dikumpulkan hanya terbatas dalam satu tahun pemberitaan.

### 5.4 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan yang telah didapatkan, maka berikut ini adalah saran yang bisa peneliti sampaikan.

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menambahkan kategori tindak kecurangannya sehingga lebih spesifik dan lebih banyak yang bisa ditemukan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menambahkan beberapa media pemberitaan sebagai sumber datanya agar ada variasi sumber data sehingga ada perbandingan pada analisis hasil pengumpulan data yang dilakukan nantinya.
3. Bagi peneliti selanjutnya bisa meregulasasi penelitian dengan menambah periode tahun pengambilan data berita tidak hanya satu tahun. Agar kasus-kasus yang panjang bisa dianalisis sampai kasus tersebut selesai.

4. Penelitian ini merekomendasikan otoritas untuk lebih transparan dalam menangani kasus-kasus penipuan yang melibatkan pejabat negara dengan mempercepat prosedur persidangan dan memberi hukuman yang sesuai atau tindakan yang diambil untuk mereka yang terlibat dalam kasus korupsi ini.
5. Untuk pemerintahan Indonesia bisa memperbaiki sistem regulasinya untuk mencegah terdapatnya celah untuk oknum-oknum melakukan kecurangan atau korupsi di sektor pemerintahan Indonesia.



## DAFTAR REFERENSI

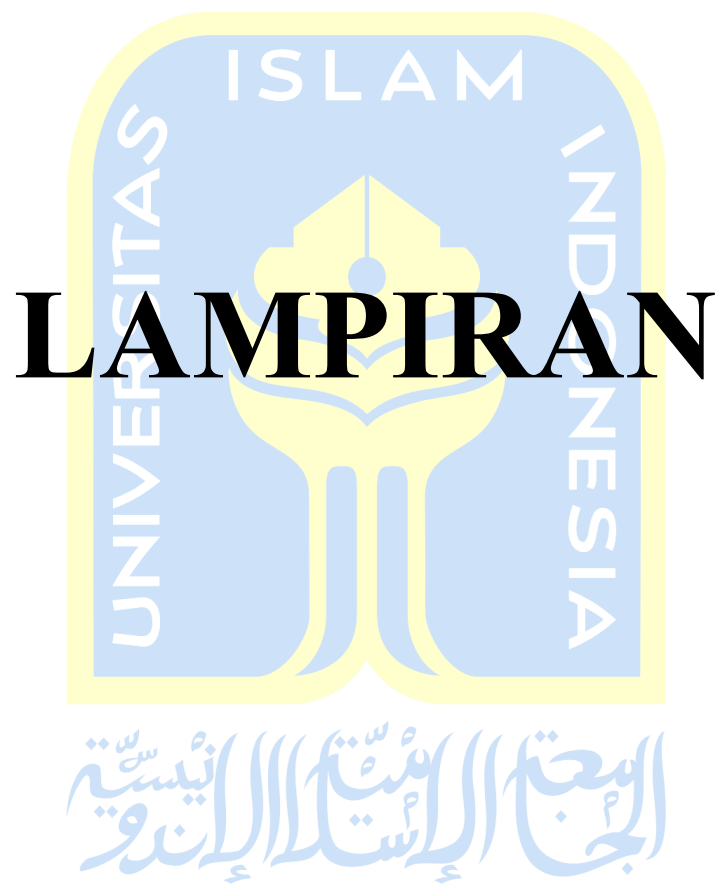
- Abd, Rauf., Yusoff, H., Othman, R., Yatim, N., Poobalan, U.R. and Che Salleh, S. 2015. *“Public Sector Accounting: Malaysian context”*. Pearson. Kuala Lumpur
- Akir, O. and Ma lie, S. 2012. *“Integrity dimension and religious orientation in aspect of employees job conduct: an exploratory model building”*, *Procardia – Social and Behavioral Sciences*, Vol. 62, pp.167 – 174.
- Ali, Nor Aishah Mohd., Abu, Nor’Asyiqin., and Hussain, Wan Shafizah. 2017. *“Profiling Fraud Committed by Public Sector Employees: Evidence from the Malaysian Media Reporting.”* p. 32-34
- Apriadi, Rangga. 2015. *”Determinan Terjadinya Fraud di Institusi Pemerintahan”*.Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya Malang.
- Arikunto, Suharsimi. 2001. *“Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek”*. Jakarta: Rineka Cipta
- Aziz, M.A.A., Rahman, H.A., Alam, M.M. and Said, J. 2015. *“Enhancement of the accountability of public sectors through integrity system”*, *Internal Control System and Leadership Practices: A Review Study, Procedia Economics and Finance*, Vol. 28, pp. 163-169.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Peraturan No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2010. *“Pedoman Teknis Fraud Control Plan (FCP)”*, Jakarta: Deputi Bidang Investigasi BPKP.
- Bologna, Jack. 1993. *“Handbook of Corporate Fraud”*. Boston: Butterworth-Heinemann.
- Cressey, Donald R. 1953. *“Other People Money, a Study in The Social Psychology of Embezzlement”*. Montclair:Patterson Smith.
- Debreceny, R.S. and Gray, G.L. 2010. *“Data mining journal entries for fraud detection: an exploratory study”*, *International Journal of Accounting Information Systems*, Vol. 11 No. 3, pp. 157-181.
- Gbegi, D. and Adebisi, J. F. 2013. *“The new fraud diamond model – how can it help forensic accountants in fraud investigation in Nigeria?”* *European Journal of Accounting Auditing and Finance Research*, Vol. 1.

- Ermansjah Djaja. 2010. "Memberantas Korupsi Bersama KPK". Jakarta, Sinar Grafika.
- Haniza Hanim, M. B., Norazida, M. and Jamaliah, S. 2017. "Mitigating Asset Misappropriation through integrity and fraud risk elements: Evidence Emerging Economies". . 4, pp. 129 -138
- Herdiansyah, Haris. 2011. "Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial". Jakarta: Salemba Humanika.
- Husein, Umar., 2005. "Metode Penelitian". Jakarta : Salemba Empat.
- Institute of Internal Auditors (IIA).2009. "International Profesional Practices Framework (IPPF)". Altamonte Springs, Florida: IIA
- Keller and Owens. 2015. "Preventing and detecting fraud in not-for-profit organizations". Updated edition, available at: [www.kellerowens.com/wp-content/uploads/2011/12/FraudBooklet.pdf](http://www.kellerowens.com/wp-content/uploads/2011/12/FraudBooklet.pdf)
- Kountur, Ronny. 2007. "Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis", edisi revisi. Jakarta : penerbit PPM.
- Kurohman, Taufik., Pratiwi, Ekaning., dan Adriana. 2017. "Deteksi Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan". Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Kriyantono, Rachmat. 2009. "Teknik Praktis Riset Komunikasi". Jakarta: Kencana.
- Levi, M. 2007. "Policing financial crimes", in Pontell, H.N. and Geis, G. (Eds), International Handbook of White-Collar and Corporate Crime, Springer, New York, NY.
- Levi, M. and Burrows, J. 2008. "Measuring the impact of fraud in the UK: a conceptual and empirical journey", British Journal of Criminology, Vol.48 No. 3, pp. 293-318.
- Moleong, Lexy. J. 2011. "Metodologi Penelitian Kualitatif". PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Napitupulu, Diana. 2010. "KPK in Action". Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Neuman, W.L. 2014. "Basic Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches", 7<sup>th</sup> Ed. Pearson Education Limited.
- Palshikar, G.K. 2002. "The Hidden truth". Intelligent Enterprise.com. 28 May, pp. 46-51.

- Pawi, S., Juanil, D.M., Zahari, W. and Yusoff, W. 2011. “*Property Tax performance of local authorities in Malaysia*”, *Artificial Intelligence*, Vol. 6 No. 1, pp. 42-46.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. “Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi”. Bandung: Mandar Maju
- Ramadhana, Senna. 2015. “Persepsi Pegawai Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan (*Fraud*)”. Universitas Negeri Semarang.
- Revida, Erika. 2003. “Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya”. Sumatera Utara: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
- Sawyer, L.B., Dittenhofer, M.A. and Sheiner, J.H., 2006. “*Audit Internal Sawyer*” 5th ed. A. Akbar, ed., Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sekaran, U., and Bougie, R. 2017. “*Metode Penelitian untuk Bisnis*”, 6th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudarmo, Sawardi., dan Yulianto, A., 2008. “*Fraud Auditing*”, 5th ed., Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Sulistiyono. 2015. “Studi Kualitatif Deskriptif Perilaku Konsumen Rilis Vynil di Yogyakarta”. Yogyakarta. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Tuanakotta. 2007. “*Audit Forensik dan Audit Investigasi*”. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Wardiman, Joyonegoro. 2013. Jurnal Ilmiah “Pidana Korupsi di Indonesia”. Universitas Negeri Semarang
- Wilopo. 2008. “Pengaruh Pengendalian Internal Birokrasi Pemerintahan dan Pelaku Tindak Etis Birokrasi terhadap Kecurangan Akuntansi Di Pemerintahan Persepsi Auditor Badan Pemeriksa Keuangan”. *Jurnal Ventura Volume 11 no. 1 April 2008*.

<https://www.4imn.com/about/index.htm> top4asia diakses pada 13 November 2017

<https://media.neliti.com/media/publications/170649-ID-fenomena-korupsi-sebagai-patologi-sosial.pdf> diakses pada 27 Januari 2018



## Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Januari 2017

Tabel 1.1 Total Berita Bulan Januari

Bulan	Surat Kabar Kompas
Januari	201
Februari	
Maret	
April	
Mei	
Juni	
Juli	
Agustus	
September	
Oktober	
November	
Desember	
<b>Total</b>	<b>201</b>

Tabel 1.2 Jenis-Jenis *Fraud*

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	181
2	15
3	5
<b>Total</b>	<b>201</b>

Tabel 1.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	150	12	4	166
Jawa Tengah	2	-	-	2
Buton	10	-	-	10
Cimahi	3	-	-	3
Klaten	9	-	-	9
Kebumen	1	-	-	1
Nganjuk	2	-	-	2
Sumatera Barat	5	-	-	5
Tanggamus	1	-	-	1
Maluku	2	-	-	2
<b>Total</b>	<b>185</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>201</b>



**Tabel 1.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan Indonesia**

Tingkat Yuridiksi	Jenis-Jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	150	12	4	166
Daerah	35	-	-	35
<b>Total</b>	<b>185</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>201</b>

**Tabel 1.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen**

No	Departemen – Departemen	Frekuensi
1	Badan Keamanan Laut	9
2	Ditjen Pajak	5
3	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	3
4	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	1
5	Kementerian Dalam Negeri	1
6	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)	6
7	Disdikpora Kebumen	1
8	Pupuk Perum Perhutani	2
9	Pemprov DKI	14
10	BUMN / Garuda Indonesia	25
11	Mahkamah Konstitusi	89
12	Direktur PLN	1
13	Kasus E-KTP	15
14	Pemda Cimahi	3
15	DPD RI	1
16	Ditjen P2KTrans Kementerian Tenaga Kerja	1
17	Podomoro Land	1
18	Lain-Lain	6
19	APBD Tanggamus	1
20	Pemda Klaten	9
21	Pemprov Sumatra Barat	4
22	PT. Berdikari	1
23	Pemda Nganjuk	2
<b>TOTAL</b>		<b>201</b>

## Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Februari 2017

Tabel 2.1 Total Berita Bulan Februari

Bulan	Surat Kabar Kompas
Januari	-
Februari	110
Maret	-
April	-
Mei	-
Juni	-
Juli	-
Agustus	-
September	-
Oktober	-
November	-
Desember	-
<b>Total</b>	<b>110</b>

Tabel 2.2 Jenis-Jenis *Fraud* Bulan Februari

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	103
2	-
3	7
<b>Total</b>	<b>110</b>

Tabel 2.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	80	-	7	87
Cimahi	2	-	-	2
Kebumen	1	-	-	1
Sumatera Barat	3	-	-	3
Maluku	7	-	-	7
Papua	1	-	-	1
Madiun	6	-	-	6
Nusa Tenggara Barat	3	-	-	3
<b>Total</b>	<b>103</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>110</b>

**Tabel 2.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan Indonesia**

Tingkat Yuridiksi	Jenis-Jenis Fraud			Total
	1	2	3	
Pusat	80	-	7	87
Daerah	23	-	-	23
<b>Total</b>	<b>103</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>110</b>

**Tabel 2.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen**

No	Departemen – Departemen	Frekuensi
1	Badan Keamanan Laut	1
2	Ditjen Pajak	12
3	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	2
4	DPR RI	5
5	Kementrian Dalam Negeri	1
6	Kementrian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)	6
7	Disdikpora Kebumen	1
8	Atase Imigrasi Kedubes Malay	4
9	Dinas PU Provinsi Papua	1
10	BUMN / Garuda Indonesia	11
11	Mahkamah Konstitusi	17
12	Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	5
13	Kasus E-KTP	10
14	Pemda Cimahi	2
15	DPD RI	3
16	Ditjen P2KTrans Kementrian Tenaga Kerja	3
17	Menteri Kesehatan	4
18	Lain-Lain	1
19	Otorisasi Jasa Keuangan (OJK)	2
20	Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan	1
21	Hambalang	4
22	Pemda Madiun	8
23	Menteri Pertanian	1
24	PT. Kalimantan Electric Power	1
25	PT. Pelindo II	1
26	Kepala Kejaksaan Negeri Praya	3
<b>Total</b>		<b>110</b>

## Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Maret 2017

Tabel 3.1 Total Berita Bulan Maret

Bulan	Surat Kabar Kompas
Januari	-
Februari	-
Maret	393
April	-
Mei	-
Juni	-
Juli	-
Agustus	-
September	-
Oktober	-
November	-
Desember	-
<b>Total</b>	<b>393</b>

Tabel 3.2 Jenis-Jenis *Fraud* Bulan Maret

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	381
2	3
3	9
<b>Total</b>	<b>393</b>

Tabel 3.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	353	1	9	363
Banten	9	-	-	9
Bali	1	-	-	1
Surabaya	-	2	-	2
Cimahi	1	-	-	1
Klaten	2	-	-	2
Nganjuk	2	-	-	2
Madiun	3	-	-	3
Maluku	6	-	-	6
Papua	2	-	-	2
Sumatera Utara	2	-	-	2
<b>Total</b>	<b>381</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>393</b>

**Tabel 3.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan Di Indonesia**

Tingkat Yuridiksi	Jenis-Jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	353	1	9	363
Daerah	28	2	-	30
<b>Total</b>	<b>381</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>393</b>

**Tabel 3.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen**

No	Departemen – Departemen	Frekuensi
1	Badan Keamanan Laut	8
2	Ditjen Pajak	14
3	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	1
4	Dinas PU Provinsi Papua	1
5	Kementerian Dalam Negeri	1
6	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)	11
7	Menteri Kesehatan	1
8	Atase Imigrasi Kedubes Malay	1
9	Pemprov DKI	1
10	BUMN / Garuda Indonesia	7
11	Mahkamah Konstitusi	13
12	Hambalang	2
13	Kasus E-KTP	278
14	Pemda Cimahi	1
15	DPD RI	4
16	Ditjen P2KTrans Kementerian Tenaga Kerja	2
17	Pemda Madiun	3
18	Lain-Lain	8
19	POLRI	2
20	Pemda Klaten	2
21	Pemprov Sumatra Utara	2
22	PT. Pelindo II	1
23	Pemda Nganjuk	2
24	DPR RI	3
25	Pemprov Banten	9
26	Universitas Udayana	1
27	Kejaksaan Agung	1
28	Perlindungan Hortikultura Kementerian Pertanian	1
29	Asian Games (Inasgoc)	1
30	PT.Bintuni Energi Persada(Papua)	1
31	PT.PAL	10
<b>TOTAL</b>		<b>393</b>

## Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan April 2017

Tabel 4.1 Total Berita Bulan April

Bulan	Surat Kabar Kompas
Januari	-
Februari	-
Maret	-
April	171
Mei	-
Juni	-
Juli	-
Agustus	-
September	-
Oktober	-
November	-
Desember	-
<b>Total</b>	<b>171</b>

Tabel 4.2 Jenis-Jenis *Fraud* Bulan April

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	171
2	-
3	-
<b>Total</b>	<b>171</b>

Tabel 4.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	168	-	-	168
Madiun	1	-	-	1
Klaten	2	-	-	2
<b>Total</b>	<b>171</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>171</b>

Tabel 4.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan di Indonesia

Tingkat Yuridiksi	Jenis-Jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	168	-	-	168
Daerah	3	-	-	3
<b>Total</b>	<b>171</b>	-	-	<b>171</b>

Tabel 4.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen

No	Departemen – Departemen	Frekuensi
1	Badan Keamanan Laut	10
2	Menteri Kesehatan	4
3	Kasus E-KTP	124
4	DPRD	1
5	Mahkamah Konstitusi	4
6	PT PAL	7
7	Menteri Desa	2
8	Ditjen Pajak	3
9	Ditjen P2kTrans	2
10	Pemerintah Kota Madiun	1
11	Badan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)	7
12	Pemerintah Daerah Klaten	2
13	Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama	3
14	Atase Imigrasi	1
	<b>Total</b>	<b>171</b>

الجمهورية الإسلامية الإندونيسية

## Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Mei 2017

Tabel 5.1 Total Berita Bulan Mei

Bulan	Surat Kabar Kompas
Januari	-
Februari	-
Maret	-
April	-
Mei	316
Juni	-
Juli	-
Agustus	-
September	-
Oktober	-
November	-
Desember	-
<b>Total</b>	<b>316</b>

Tabel 5.2 Jenis-Jenis *Fraud* Bulan Mei

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	313
2	1
3	2
<b>Total</b>	<b>316</b>

Tabel 5.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	310	1	2	313
Buton	1	-	-	1
Maluku	2	-	-	2
<b>Total</b>	<b>313</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>316</b>



**Tabel 5.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan di Indonesia**

Tingkat Yuridiksi	Jenis-Jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	310	1	2	313
Daerah	3	-	-	3
<b>Total</b>	<b>313</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>316</b>

**Tabel 5.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen**

No	Departemen – Departemen	Frekuensi
1	Badan Keamanan Laut	11
2	Ditjen Pajak	18
3	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)	7
4	Menteri Kesehatan	19
5	BUMN / Garuda Indonesia	1
6	Mahkamah Konstitusi	16
7	Hambalang	4
8	Kasus E-KTP	162
9	DPD RI	1
10	Lain-Lain	5
11	TNI	6
12	DPR RI	1
13	Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama	30
14	Universitas Udayana	2
15	Kwarda Pramuka( DKI)	1
16	Perlindungan Hortikultura Kementerian Pertanian	1
17	Bantuan likuiditas bank indonesia(BLBI)	25
18	PT.asuransi jasa Indonesia	2
19	PT.PAL	4
<b>TOTAL</b>		<b>316</b>

## Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Juni 2017

Tabel 6.1 Total Berita Bulan Juni

Bulan	Surat Kabar Kompas
Januari	-
Februari	-
Maret	-
April	-
Mei	-
Juni	270
Juli	-
Agustus	-
September	-
Oktober	-
November	-
Desember	-
<b>Total</b>	<b>270</b>

Tabel 6.2 Jenis-Jenis *Fraud*

Jenis-jenis Fraud	Surat Kabar Kompas
1	262
2	4
3	4
<b>Total</b>	<b>270</b>

Tabel 6.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	190	4	3	197
Mojokerto (Jatim)	32	-	-	32
Maluku	6	-	-	6
Bengkulu	31	-	-	31
Papua	1	-	-	1
Banten	3	-	-	3
<b>Total</b>	<b>263</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>270</b>

**Tabel 6.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan Indonesia**

Tingkat Yuridiksi	Jenis-Jenis Fraud			Total
	1	2	3	
Pusat	190	4	3	197
Daerah	73	-	-	73
<b>Total</b>	<b>263</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>270</b>

**Tabel 6.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen**

No	Departemen – Departemen	Frekuensi
1	Badan Keamanan Laut	4
2	Ditjen Pajak	13
3	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	3
4	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	1
5	BPK	6
6	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)	7
7	Menteri Kesehatan	47
8	Pembangunan Daerah Tertinggal&Transmigrasi	2
9	Pemprov Jatim	17
10	BUMN / Garuda Indonesia	1
11	Mahkamah Konstitusi	19
12	Hambalang	8
13	Kasus E-KTP	49
14	Pemprov Banten	3
15	PT Pertamina	3
16	Ditjen P2KTrans Kementerian Tenaga Kerja	1
17	Pemprov Bengkulu	37
18	Lain-Lain	9
19	POLRI	1
20	PT Garam	7
21	Bank Pembangunan Daerah Papua	1
22	PT. Pelindo II	1
23	TNI	4
24	DPR RI	2
25	Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama	3
26	Dinas Pekerja umum dan penataan ruang Mojokerto	15
27	Bantuan likuiditas bank indonesia(BLBI)	6
<b>TOTAL</b>		<b>270</b>

## Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Juli 2017

Tabel 7.1 Total Berita Bulan Juli

Bulan	Surat Kabar Kompas
Januari	-
Februari	-
Maret	-
April	-
Mei	-
Juni	-
Juli	295
Agustus	-
September	-
Oktober	-
November	-
Desember	-
<b>Total</b>	<b>295</b>

Tabel 7.2 Jenis-Jenis *Fraud*

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	294
2	-
3	1
<b>Total</b>	<b>295</b>

Tabel 7.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	279	-	1	280
Sulawesi Tenggara	3	-	-	3
Banten	3	-	-	3
Bengkulu	1	-	-	1
Maluku	7	-	-	7
Klateb	1	-	-	1
<b>Total</b>	<b>294</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>295</b>

**Tabel 7.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan Indonesia**

Tingkat Yuridiksi	Jenis-Jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	279	-	1	280
Daerah	15	-	-	15
<b>Total</b>	<b>294</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>295</b>

**Tabel 7.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen**

No	Departemen – Departemen	Frekuensi
1	Badan Keamanan Laut	7
2	Ditjen Pajak	6
3	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	4
4	DPR RI	1
5	Pemprov DKI	1
6	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)	7
7	Univ Udaya(RS Pend Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata)	5
8	BLBI	2
9	Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama	6
10	BPK	3
11	Mahkamah Konstitusi	22
12	Pembangunan Daerah Tertinggal&Transmigrasi	2
13	Kasus E-KTP	210
14	Pemda Klaten	1
15	Kejaksaan Tinggi( Pemprov Bengkulu)	1
16	Pemda Banten	3
17	Pemprov sulawesi tenggara	3
18	Lain-Lain	6
19	Hambalang	3
20	PT. PAL	2
<b>Total</b>		<b>295</b>

## Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Agustus 2017

Tabel 8.1 Total Berita Bulan Agustus

Bulan	Surat Kabar Kompas
Januari	-
Februari	-
Maret	-
April	-
Mei	-
Juni	-
Juli	-
Agustus	346
September	-
Oktober	-
November	-
Desember	-
<b>Total</b>	<b>346</b>

Tabel 8.2 Jenis-Jenis *Fraud*

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	343
2	1
3	2
<b>Total</b>	<b>346</b>

Tabel 8.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	251	-	2	253
Jawa Tengah	1	-	-	1
Maluku	4	-	-	4
Papua	1	-	-	1
Madiun	1	-	-	1
Banten	1	-	-	1
Jawa Timur	5	-	-	5
Bengkulu	4	-	-	4
Pamekasan	33	-	-	33
Aceh Barat	-	1	-	1
Riau	5	-	-	5
Malang	16	-	-	16
Mojokerto	2	-	-	2
Tegal	19	-	-	19
<b>Total</b>	<b>343</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>346</b>

**Tabel 8.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan Indonesia**

Tingkat Yuridiksi	Jenis-Jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	251	-	2	253
Daerah	92	1	-	93
<b>Total</b>	<b>343</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>346</b>

**Tabel 8.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen**

NO	Departemen-Departemen	Frekuensi
1	Badan Keamanan Laut	4
2	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)	4
3	Kasus E-KTP	115
4	DPR RI	2
5	Pertamina	2
6	BUMN	3
7	Mahkamah Konstitusi	19
8	Ditjen P2KTrans Kementerian Tenaga Kerja	3
9	Pemerintahan Daerah Madiun	3
10	Pemerintah Daerah Pamekasan	35
11	Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan	1
12	Pemerintahan Daerah Riau	5
13	Pemerintahan Daerah Malang	16
14	Menteri Desa	3
15	Kementerian Hubungan	33
16	Pemerintahan Tegal	19
17	Mahkamah Agung	1
18	Lain- Lain	6
19	Pemerintahan Provinsi Banten	2
20	Rumah Sakir Udayana	3
21	Kejaksaan Agung	4
22	PORLI	1
23	Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama	13
24	Tentara Nasional Indonesia(TNI)	1
25	Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia	10
26	Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (PDTT)	1
27	Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	5
28	Kejaksaan Tinggi Bengkulu	5
29	Bank Pembangunan Daerah Papua	1
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mojokerto	2
31	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara	23
32	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	1
<b>Total</b>		<b>346</b>

## Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan September 2017

Tabel 9.1 Total Berita Bulan September

Bulan	Suran Kabar Kompas
Januari	-
Februari	-
Maret	-
April	-
Mei	-
Juni	-
Juli	-
Agustus	-
September	393
Oktober	-
November	-
Desember	-
<b>Total</b>	<b>393</b>

Tabel 9.2 Jenis-Jenis *Fraud*

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	384
2	-
3	9
<b>Total</b>	<b>393</b>

Tabel 9.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	288	-	9	297
Tegal	4	-	-	4
Pamekasan	4	-	-	4
Bengkulu	16	-	-	16
Sumatera Utara	12	-	-	12
Banjarmasin	8	-	-	8
Malang	16	-	-	16
Maluku	1	-	-	1
Cilegon	19	-	-	19
Banten	1	-	-	1
Kutai Kartanegara	14	-	-	14
Sulawesi tenggara	1	-	-	1
<b>Total</b>	<b>384</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>393</b>



**Tabel 9.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan Indonesia**

Tingkat Yuridiksi	Jenis-Jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	288	-	9	297
Daerah	96	-		96
<b>Total</b>	<b>384</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>393</b>

**Tabel 9.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen**

NO	Departemen-Departemen	Frekuensi
1	Badan Keamanan Laut	1
2	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)	1
3	Kasus E-KTP	195
4	DPR RI	5
5	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	1
6	Pertamina	2
7	BUMN	3
8	Mahkamah Konstitusi	14
9	Pemerintahan Provinsi DKI (Podomoro land)	1
10	Pemerintahan Daerah Malang	16
11	Menteri Desa	5
12	Kementerian Hubungan	4
13	Pemerintahan Tegal	4
14	Mahkamah Agung	1
15	Pemda Sumatera Utara (Batubara)	17
16	PDAM Banjarmasin	8
17	Pemerintah Kota Cilegon	19
18	Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1
19	Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara	19
20	Lain- Lain	14
21	Pemerintahan Provinsi Banten	1
22	Rumah Sakit Udayana	1
23	Kejaksaan Agung	3
24	PORLI	1
25	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)	1
26	Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama	7
27	Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia	25
28	Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (PDTT)	2
29	Kejaksaan Tinggi Bengkulu	16
30	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara	1
31	Pemerintah Daerah Pamekasan	4
<b>Total</b>		<b>393</b>

## Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Oktober 2017

Tabel 10.1 Total Berita Bulan Oktober

Bulan	Surat Kabar Kompas
Januari	-
Februari	-
Maret	-
April	-
Mei	-
Juni	-
Juli	-
Agustus	-
September	-
Oktober	246
November	-
Desember	-
<b>Total</b>	<b>246</b>

Tabel 10.2 Jenis-Jenis *Fraud*

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	243
2	-
3	3
<b>Total</b>	<b>246</b>

Tabel 10.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	170	-	3	170
Konawe	7	-	-	7
Pamekasan	1	-	-	1
Bengkulu	1	-	-	1
Sumatera Utara	3	-	-	3
Banjarmasin	1	-	-	1
Malang	12	-	-	12
Jatim	1	-	-	1
Cilegon	3	-	-	3

Dumai	2	-	-	2
Kutai Kartanegara	10	-	-	10
Sulawesi tenggara	1	-	-	1
Papua	1	-	-	1
Subang	1	-	-	1
Manado	15	-	-	15
Batu Bara	1	-	-	1
Surakarta	1	-	-	1
Nganjuk	12	-	-	12
<b>Total</b>	<b>243</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>246</b>

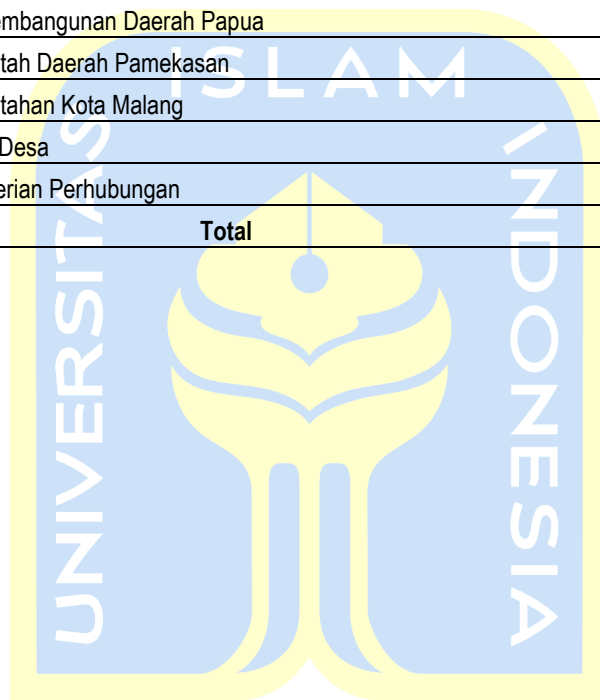
**Tabel 10.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan Indonesia**

Tingkat Yuridiksi	Jenis-Jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	168	-	3	171
Daerah	75	-	-	75
<b>Total</b>	<b>243</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>246</b>

**Tabel 10.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen**

NO	Departemen – Departemen	Frekuensi
1	Badan Keamanan Laut	1
2	Lain- Lain	11
3	Kasus E-KTP	106
4	DPR RI	9
5	Pemerintahan Kabupaten Nganjuk	12
6	Atase Imigrasi	5
7	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	2
8	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	10
9	Pemerintah Daerah Konawe Utara	7
10	DPRD	2
11	Pemerintah Daerah Dumai	2
12	Pemerintah Kabupaten Subang	1
13	Pengadilan Tinggi Manado	15
14	Pemerintah Kota Surakarta	1
15	Pemerintahan Provinsi DKI (Podomoro land)	1
16	Pemda Sumatera Utara (Batubara)	4
17	PDAM Banjarmasin	1

18	Pemerintah Kota Cilegon	3
19	PORLI	1
20	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)	2
21	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara	1
22	Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama	1
23	Tentara Nasional Indonesia(TNI)	4
24	Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK)	15
25	Kejaksaan Tinggi Bengkulu	1
26	Bank Pembangunan Daerah Papua	1
27	Pemerintah Daerah Pamekasan	1
28	Pemerintahan Kota Malang	12
29	Menteri Desa	4
30	Kementerian Perhubungan	10
<b>Total</b>		<b>246</b>



الجامعة الإسلامية  
الاستدلاء الاندوني

## Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan November 2017

Tabel 11.1 Total Berita Bulan November

Bulan	Surat Kabar Kompas
Januari	-
Februari	-
Maret	-
April	-
Mei	-
Juni	-
Juli	-
Agustus	-
September	-
Oktober	-
November	368
Desember	-
<b>Total</b>	<b>368</b>

Tabel 11.2 Jenis-Jenis *Fraud*

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	367
2	-
3	1
<b>Total</b>	<b>368</b>

Tabel 11.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	343	-	1	344
Nganjuk	2	-	-	2
Batu Bara	1	-	-	1
Bengkulu	1	-	-	1
Sumatera Utara	1	-	-	1
Jambi	6	-	-	6
Malang	1	-	-	1
Maluku	6	-	-	6
Mojokerto	1	-	-	1
Banten	1	-	-	1
Kutai Kartanegara	1	-	-	1
Sulawesi Tenggara	3	-	-	3
<b>Total</b>	<b>367</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>368</b>

**Tabel 11.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan Indonesia**

Tingkat Yuridiksi	Jenis-Jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	343	-	1	344
Daerah	24	-	-	24
<b>Total</b>	<b>387</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>368</b>

**Tabel 11.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen**

NO	Departemen-Departemen	Frekuensi
1	Tentara Nasional Indonesia(TNI)	4
2	Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia	5
3	Kasus E-KTP	311
4	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)	8
5	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	4
6	Pemerintahan Daerah Nganjuk	2
7	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)	2
8	Pemerintahan Provinsi Banten	1
9	Rumah Sakit Udayana	2
10	Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (PDTT)	1
11	Pertamina	1
12	PT KAI	2
13	Lain- Lain	3
14	Kejaksaan Tinggi Bengkulu	1
15	Pemerintahan Daerah Malang	1
16	Menteri Desa	1
17	Kementerian Hubungan	6
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mojokerto	1
19	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara	3
20	Pemda Sumatera Utara (Batubara)	2
21	Pemprov Jambi	6
22	Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara	1
<b>Total</b>		<b>368</b>

## Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Desember 2017

Tabel 12.1 Total Berita Bulan Desember

Bulan	Surat Kabar Kompas
Januari	-
Februari	-
Maret	-
April	-
Mei	-
Juni	-
Juli	-
Agustus	-
September	-
Oktober	-
November	-
Desember	145
<b>Total</b>	<b>145</b>

Tabel 12.2 Jenis-Jenis *Fraud*

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	141
2	-
3	4
<b>Total</b>	<b>145</b>

Tabel 12.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	127	-	4	131
Mojokerto	4	-	-	4
Nganjuk	2	-	-	2
Jambi	6	-	-	6
Tegal	1	-	-	1
Sulawesi tenggara	1	-	-	1
<b>Total</b>	<b>141</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>145</b>

**Tabel 12.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan Indonesia**

Tingkat Yuridiksi	Jenis-Jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	127	-	4	131
Daerah	14	-	-	14
<b>Total</b>	<b>141</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>145</b>

**Tabel 12.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen**

NO	Departemen – Departemen	Frekuensi
1	Badan Keamanan Laut	1
2	Lain- Lain	4
3	Kasus E-KTP	98
4	Pemkot Mojokerto	4
5	Pemerintahan Kabupaten Nganjuk	2
6	Pmprov Jambi	6
7	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	1
8	Pemkot Tegal	1
9	Pmprov Sulawesi Tenggara	1
10	PUPR	2
11	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)	4
12	Tentara Nasional Indonesia(TNI)	2
13	Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK)	4
14	Kementerian Perhubungan	15
	<b>Total</b>	<b>145</b>